

**ANALISIS PROSPEKTIFITAS PENGEMBANGAN KAWASAN  
INDUSTRI DI KECAMATAN TENAYAN RAYA**

**TUGAS AKHIR**

*Dibjarkan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota  
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau  
Pekanbaru*



Oleh :

**LEO GRANDISIANTO FAHLEPI**  
**133410372**

**PROGRAM STUDI PRENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

**KAJIAN PROSPEKTIFITAS PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI  
DI KECAMATAN TENAYAN RAYA**

**LEO GRANDISIANTO FAHLEPI**

**133410372**

**ABSTRAK**

Kecamatan Tenayan Raya memiliki jumlah industri terbesar dari kecamatan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu sebanyak 866 industri. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berpotensi menyumbangkan pendapatan yang besar untuk Kota Pekanbaru, adanya rencana pembangunan kawasan industri tenayan di dalam draft RTRW Kota Pekanbaru, untuk itu perlu dikaji tingkat prospektifitas pengembangan kawasan industri.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi sektor unggulan di Kecamatan Tenayan Raya, mengidentifikasi potensi dan permasalahan terkait dengan sektor industri di Kecamatan Tenayan Raya, dan mengukur tingkat prospektifitas pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya. Penelitian ini menggunakan analisis LQ (*Location Quotient*), *Analisis Shift and Share* untuk mengidentifikasi sektor unggulan, *Analisis SWOT (SAP & ETOP)* untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan terkait sektor industri, dan analisis tingkat prospektifitas secara deskriptif.

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis LQ didapatkan nilai skor 1, yang berarti sektor industri merupakan sektor basis yang potensial untuk dikembangkan kedepannya. Kemudian dengan analisis *Shift and Share* didapatkan bahwa sektor industri berada posisi kuadran unggulan. Dengan analisis SWOT (SAP & ETOP) diperoleh bahwa pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya memiliki Prospektifitas untuk dikembangkan kedepannya.

*Kata Kunci : Sektor Unggulan, Pengembangan Kawasan, Industri, Prospektifitas*

**STUDY OF INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT PROSPECTIVITY  
IN TENAYAN RAYA DISTRICT**

**LEO GRANDISIAN TO FAHLEPI**

**133410372**

**ABSTRACT**

Tenayan Raya district has the largest number of industries from other districts in Pekanbaru City, totaling 866 industries. The industrial sector is one sector that has the potential to contribute a large income to the city of Pekanbaru, there is a Tenayan industrial area development plan in RTRW draft for Pekanbaru City, therefore it is necessary to study the prospectivity level of development industrial area.

The purpose of this study was to identify leading sectors in the District of Tenayan Raya, identify potentials and problems related to the industrial sector in District of Tenayan Raya, and identify the level of prospectiveness of the development of industrial area in the District of Tenayan Raya. This study uses LQ (Location Quotient) analysis, Shift and Share Analysis to identify leading sector, SWOT Analysis (SAP & ETOP) to identify potential and problems related to the industrial sector, and descriptive analysis of prospectivity levels.

The results of the study using LQ analysis obtained a score of 1, which means the industry sector is a potential base sector to be developed in the future. Then with the Shift and Share analysis it was found that the industrial sector is in the leading quadrant position. With the SWOT analysis (SAP & ETOP), it is found that the development of industrial area in Tenayan Raya District has Prospectivity to be developed in the future.

**Keywords:** Leading Sector, Regional Development, Industry, Prospectivity

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis sampaikan kehadirat ALLAH Subhanahuwata'alla, Tuhan Yang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "*Kajian Prospektifitas Pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Tenayan Raya*" sebagai salah satu untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata I pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terimakasih yang setulus tulusnya kepada :

1. Ayahanda M. Husni, S.Hut, Ibunda Aisyah dan keluarga besar yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, motivasi, materi dan pengorbanan yang tidak terhingga.
2. Bapak Dr. Eng. Muslim, ST., MT. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Puji Astuti, ST., MT. selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Muhammad Sofwan, ST., MT. selaku Sekertaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
5. Ibu Puji Astuti, ST., MT. selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan pengarahan dan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Islam Riau khususnya Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Planologi angkatan 2013 yang senantiasa rela membagi ilmu, motivasi, persaudaraan, waktu, solidaritas.
8. Kepada seluruh Keluarga Besar KPK yang senantiasa mendukung serta selalu berbagi ilmu kepada penulis.
9. Serta seluruh pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan demi perbaikan dimasa akan datang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin.

Pekanbaru, 14 September 2020

Leo Grandisianto Fahlepi

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah .....	7
1.5.2 Ruang Lingkup Studi .....	11
1.6 Kerangka Pikir .....	13
1.7 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
2.1 Industri .....	16
2.1.1 Pengertian Industri.....	16
2.1.2 Industrialisasi Dalam Islam .....	20
2.1.3 Kawasan Industri .....	24
2.1.3.1 Pengertian Kawasan Industri .....	24
2.1.3.2 Prasarana Kawasan Industri .....	28

2.1.3.3 Prinsip-prinsip Pengembangan Kawasan Industri .....	29
2.1.3.4 Kriteria Lokasi Kawasan Industri .....	32
2.1.3.5 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri .....	41
2.1.3.6 Proses Perizinan Terkait dengan Rencana Pengembangan Kawasan Industri .....	42
2.1.3.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kawasan Industri .....	46
2.1.3.8 Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembangan Kawasan Industri .....	55
2.2 Sektor Unggulan .....	56
2.2.1 Pengertian Sektor Unggulan.....	56
2.2.2 Kriteria Penentuan Sektor Unggulan .....	57
2.3 Teori Basis Ekonomi .....	58
2.4 Prospektifitas.....	60
2.4.1 Pengertian Prospektifitas .....	60
2.4 Penelitian Terdahulu .....	61
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Metode Penelitian .....	70
3.2 Teknik Penelitian .....	71
3.2.1 Jenis Data .....	71
3.2.2 Sumber Data.....	71
3.3 Tahapan Penelitian .....	72
3.3.1 Tahap Persiapan .....	72

3.3.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian.....	73
3.3.3 Tahap Kompilasi Data .....	73
3.4 Teknik Sampling .....	74
3.5 Analisis Data .....	75
3.5.1 Analisa Prospek Pengembangan .....	75
3.5.2 Analisis Variabel Eksternal (Matriks ETOP).....	76
3.5.3 Analisis Variabel Internal .....	77
3.5.4 Analisis Matriks SWOT.....	78
3.5.5 Analisa Sektor Ekonomi Basis.....	79
3.5.6 Analisa <i>Shift and Share</i> .....	81
3.6 Variabel Penelitian .....	84
3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	87
 <b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
4.1 Kondisi Geografis dan Administratif.....	88
4.2 Kependudukan .....	89
4.3 Perekonomian .....	93
4.4 Tenaga Kerja.....	94
4.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru .....	95
 <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Sektor Unggulan di Kecamatan Tenayan Raya .....	105
5.1.1 Analisis <i>Location Quotient (LQ)</i> .....	105
5.1.2 Analisis <i>Shift and Share</i> .....	108



5.2 Analisis SWOT (SAP & ETOP).....	115
5.2.1 Strategic Advantage Profile (SAP).....	116
5.2.2 Environmental Threats Oppurtunity Profile (ETOP) .....	120
5.2.3 Analisis SWOT (SAP & ETOP) .....	125
5.3 Analisis Tingkat Prospektifitas .....	126

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan .....	129
6.2 Saran.....	130

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	<b>Hal.</b>
Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya tahun 2018 .....	8
Tabel 2.1 Kriteria Penentuan Lokasi Industri .....	40
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	62
Tabel 3.1 Responden Penelitian .....	75
Tabel 3.2 Pertimbangan Kualitatif SWOT .....	76
Tabel 3.3 Pengelompokan Posisi SAP .....	78
Tabel 3.4 Matriks SWOT (SAP)/ETOP .....	79
Tabel 3.5 Variabel Penelitian .....	85
Tabel 3.6 Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	87
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2014-2018 .....	89
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2018 .....	91
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2018 .....	92
Tabel 4.4 Kepadatan Penduduk Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2014 - 2018 .....	93
Tabel 4.5 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2014-2018 .....	95
Tabel 4.6 PDRB Kota Pekanbaru Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016 – 2019 (Dalam Milyar Rupiah).....	96

Tabel 4.7 PDRB Provinsi Riau Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016 – 2019 (Dalam Milyar Rupiah) .....	98
Tabel 4.8 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016 – 2019 (Dalam Milyar Rupiah) .....	100
Tabel 5.1 Hasil Analisis LQ Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha.....	107
Tabel 5.2 Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau Tahun 2016 dengan 2019 .....	109
Tabel 5.3 Perubahan Pendapatan Daerah Tiap Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2016 dengan 2019 .....	111
Tabel 5.4 Komponen KPN, KPP, KPK, dan PN.....	112
Tabel 5.5 Rekapitulasi Perhitungan Elemen Kekuatan.....	117
Tabel 5.6 Rekapitulasi Perhitungan Elemen Kelemahan.....	119
Tabel 5.7 Rekapitulasi Perhitungan Elemen Peluang .....	122
Tabel 5.8 Rekapitulasi Perhitungan Elemen Ancaman.....	124
Tabel 5.9 Matriks SWOT (SAP & ETOP).....	125

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal.</b>
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Pekanbaru.....	9
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Tenayan Raya .....	10
Gambar 1.3 Kerangka Pikir .....	16
Gambar 3.1 Matriks ETOP .....	77
Gambar 4.1 Industri Kecil/Mikro .....	102
Gambar 4.2 Industri Batubata .....	103
Gambar 4.3 Industri Sedang dan Besar .....	104
Gambar 5.1 Kecenderungan Sektor di Kota Pekanbaru .....	114

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengembangan kawasan merupakan salah satu upaya dalam rangka pembangunan wilayah atau daerah dan sumber daya (alam, manusia, buatan dan teknologi) secara optimal, efisien, dan efektif. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan cara menggerakkan kegiatan ekonomi dan mengakumulasikan berbagai kegiatan investasi yang dapat menjadi pemicu (*trigger*) bagi kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, yang keseluruhannya di wadahi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah maupun kawasan (Soedarso, 2001).

Pengembangan kawasan di lakukan dengan menggerakkan segala potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan hingga mencapai titik paling optimal untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan yang berkelanjutan. Potensi yang dimaksud dapat berupa potensi pembangunan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi yang dimiliki di kawasan tersebut guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintaan yang bersifat exogenous (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal). Sedangkan kegiatan non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat. Dengan

demikian sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan di atas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis. Oleh karena itu analisis basis sangat berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2004).

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan atau kota disebabkan oleh pertumbuhan sektor industri yang menjadi sektor unggulan wilayah yang telah menyumbangkan banyak dampak positif maupun negatif. Sektor industri merupakan sektor potensial yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang. Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia yang penting, ia menghasilkan berbagai kebutuhan hidup manusia mulai dari makanan, minuman, pakaian dan perlengkapan rumah tangga sampai perumahan dan kebutuhan hidup lainnya (Abdurachmat & Maryani, 1997).

Kawasan industri adalah suatu daerah yang didominasi oleh aktivitas industri yang mempunyai fasilitas kombinasi terdiri dari peralatan pabrik, sarana penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (Dirdjojuwono, 2004). Pembangunan kawasan industri di Indonesia pertama dimulai pada tahun 1973 yaitu dengan berdirinya Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP), kemudian tahun 1974 dibangun Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), selanjutnya dibangun Kawasan Industri Cilacap (tahun 1974), menyusul Kawasan Industri Medan (tahun 1975), Kawasan Industri

Makassar (tahun 1978), Kawasan Industri Cirebon (tahun 1984), dan kawasan Industri Lampung (tahun 1986) (Kwanda, 2000).

Pembangunan industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk meningkatkan struktur ekonomi yang tidak seimbang karena terlalu bercorak pertanian ke arah struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang antara pertanian dan industri. Indonesia yang memiliki keragaman sektor usaha industri, dengan persebaran mulai dari Sabang hingga Merauke, sehingga industri patut dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional (Arifandi, 2013).

Kota Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau dan merupakan pusat perdagangan dan jasa. Selain itu, Kota Pekanbaru juga unggul dalam sektor industri, baik industri kecil, industri menengah, dan juga industri besar yang lokasinya tersebar di seluruh Kota Pekanbaru. Sektor industri berada pada urutan ketiga setelah sektor kontraktor dan sektor perdagangan besar dan eceran dalam menyumbangkan pendapatan Kota Pekanbaru di lihat pada *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru Tahun 2013-2017* (Pekanbaru dalam angka tahun 2018).

Kota Pekanbaru merumuskan perencanaan pembangunan kawasan industri pertama di Kota Pekanbaru, yaitu Kawasan Industri Tenayan atau dapat disingkat dengan KIT, yang berada di dalam wilayah administratif Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Rencana ini di tuangkan kedalam dokumen rancangan rencana pembangunan kawasan industri Kota Pekanbaru 2017-2037 dan draft RTRW Kota Pekanbaru tahun 2013.

Adanya rencana pembangunan Kawasan Industri Tenayan di dalam draft RTRW Kota Pekanbaru tahun 2013 tentunya akan menimbulkan banyak dampak

positif. Pembangunan Kawasan Industri Tenayan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri Kota Pekanbaru, menumbuhkan iklim investasi yang kondusif, memanfaatkan sumberdaya alam dan energi serta sumber daya manusia, serta akan memberikan dampak lainnya (Ningsih, 2018).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru tahun 2019, Kecamatan Tenayan Raya memiliki jumlah industri terbesar dari keseluruhan kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu sebanyak 866 industri yang mencakup industri mikro atau kecil, industri sedang, dan industri besar. Mengingat industri adalah salah satu sektor yang berpotensi menyumbang pendapatan yang cukup besar untuk Kota Pekanbaru, yang belum secara optimal dapat dimanfaatkan. Hal ini dapat dilihat dari posisi sektor industri yang masih berada pada posisi ketiga dalam penyumbang pendapatan di Kota Pekanbaru yang masih berada dibawah sektor kontraktor dan sektor perdagangan besar dan eceran, dan khususnya untuk pendapatan ekonomi masyarakat Kecamatan Tenayan Raya, dengan kelebihan tersebut dirasa bahwa Kecamatan Tenayan Raya Memiliki prospek untuk lebih dikembangkan sebagai kawasan industri kedepannya. Akan tetapi untuk mewujudkan segala hal tersebut perlu dilakukan penelitian guna mengetahui sejauh mana prospek yang dimiliki oleh kawasan tersebut untuk dikembangkan menjadi kawasan industri. Maka dari itu hal ini mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul “Kajian prospektifitas pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya” untuk dapat mengkaji dan mengukur tingkat prospektifitas pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka diperlukan kajian prospektifitas pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya, guna mengukur tingkat prospektifitas pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya. Oleh karena itu dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Sektor industri berada pada urutan ketiga dalam menyumbangkan pendapatan Kota Pekanbaru di lihat pada *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) Kota Pekanbaru. Jika potensi ini terus dikembangkan tidak menutup kemungkinan sektor industri berada pada urutan pertama dan menjadi sektor basis perekonomian.
2. Kecamatan Tenayan Raya memiliki jumlah industri terbesar di Kota Pekanbaru, dengan banyaknya jumlah industri ini, dinilai memiliki prospek yang baik kedepannya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa saja sektor-sektor unggulan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya?
2. Apa saja potensi dan permasalahan terkait dengan sektor industri yang terdapat di Kecamatan Tenayan Raya?
3. Bagaimana prospektifitas pengembangan kawasan industri Kecamatan Tenayan Raya?

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

#### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat prospektifitas pengembangan kawasan industri Kecamatan Tenayan Raya agar dapat menjadi sektor unggulan yang dapat menjadi salah satu penyumbang pendapatan untuk pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya dalam hal perekonomian.

#### **1.3.2 Sasaran**

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sektor unggulan di Kecamatan Tenayan Raya;
2. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan terkait sektor industri di Kecamatan Tenayan Raya;
3. Mengukur tingkat prospektifitas pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian Kajian Prospektifitas Pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Tenayan Raya diharapkan memiliki manfaat. Adapun manfaat yang bisa diberikan melalui penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan langsung dengan disiplin ilmu perencanaan

wilayah dan kota, serta menambah pengalaman langsung dalam pelaksanaan, penulisan dan menyusun hasil penelitian.

## 2. Manfaat Bagi Akademik

Dapat menambah berbagai penelitian yang telah beragam, menjadi sumber penelitian dan kajian terhadap akademik dan studi literatur yang digunakan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

## 3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kajian Prospektifitas Pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Tenayan Raya yang tentunya berhubungan dengan perencanaan wilayah dan kota dan pada wilayah studi lainnya.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini menjelaskan tentang ruang lingkup wilayah studi dan ruang lingkup materi. Adapun ruang lingkup wilayah berupa wilayah studi yang menjadi wilayah dalam penelitian, sedangkan ruang lingkup materi menjelaskan tentang materi-materi yang akan dibahas pada penelitian ini.

#### 1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada studi ini yaitu Kecamatan Tenayan Raya yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Luas Kecamatan Tenayan Raya adalah 171,21 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 13 (tiga belas) kelurahan diantaranya dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya**  
**Tahun 2018**

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Kulim	51,50	2041	622
2	Tangkerang Timur	9,92	20038	3574
3	Rejosari	11,11	22553	3818
4	Bencah Lesung	98,74	22322	2210
5	Sialang Rampai	-	4772	622
6	Pebatuan	-	10472	622
7	Mentangor	-	14771	622
8	Pematang Kapau	-	15471	3574
9	Sialang Sakti	-	21625	2333
10	Tuah Negeri	-	6340	258
11	Melebung	-	845	24
12	Industri Tenayan	-	2553	120
13	Bambu Kuning	-	19861	3818
<b>Total</b>		<b>171,27</b>	<b>163610</b>	<b>955</b>

*Sumber : Kecamatan Tenayan Raya Dalam Angka, Tahun 2018*

Adapun batas wilayah Kecamatan Tenayan Raya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah Barat : Sungai Sail
3. Sebelah Utara : Sungai Siak
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar

### 1.5.2 Ruang Lingkup Studi

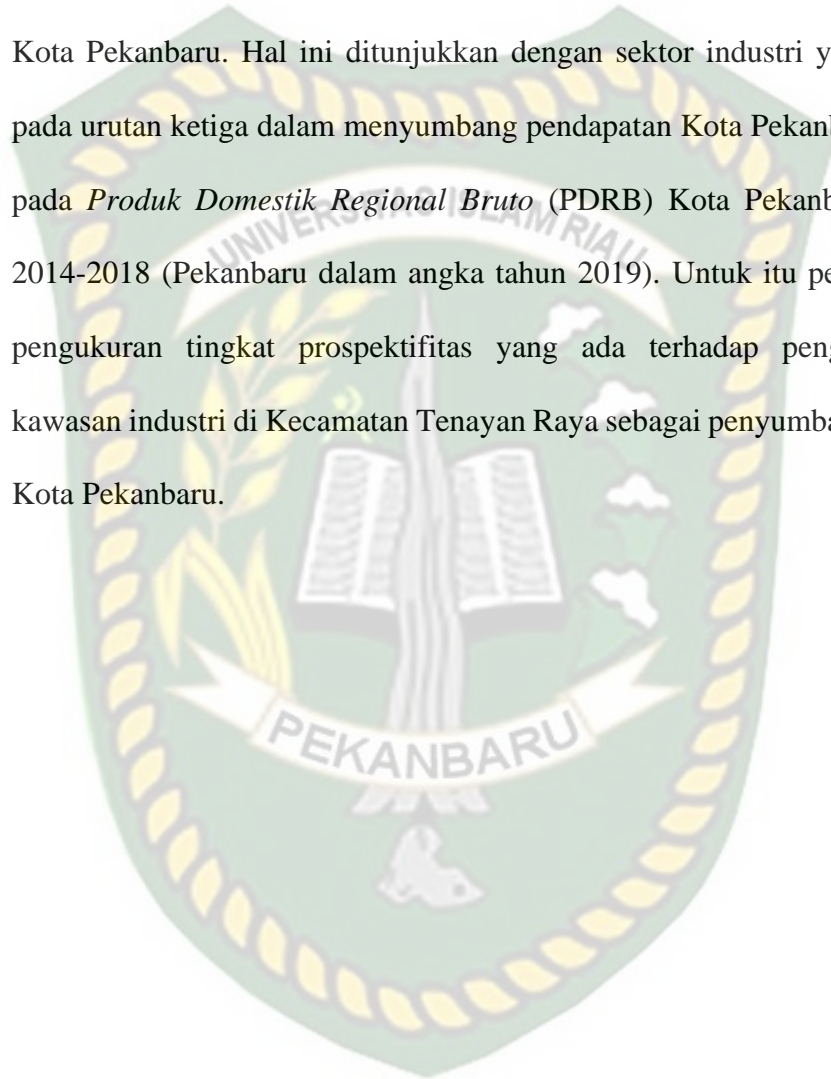
Mengingat rumusan masalah yang telah diuraikan, maka perlu adanya batasan penelitian agar pembahasan dapat lebih terarah dan efisien yakni batasan wilayah penelitian di Kecamatan Tenayan Raya dengan fokus penelitian pada prospektifitas pengembangan kawasan. Prospektifitas pengembangan kawasan merupakan salah satu upaya guna mengukur tingkat peluang peningkatan ekonomi masyarakat agar lebih baik lagi dan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Ruang lingkup materi pada penelitian tugas akhir ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi sektor industri yang sangat besar di Kecamatan Tenayan Raya terdiri dari 866 industri yang mencakup industri mikro atau kecil, industri sedang, dan industri besar. Jumlah industri ini merupakan jumlah industri terbesar dari keseluruhan kecamatan yang ada di wilayah di Kota Pekanbaru. Dengan peluang sektor industri di Kecamatan Tenayan Raya ini perlu diidentifikasi sektor unggulan di Kecamatan Tenayan Raya yang mencakup mengidentifikasi sektor basis ekonomi dan sektor unggulan di Kecamatan Tenayan Raya.
2. Kecamatan Tenayan Raya memiliki potensi untuk di kembangkan menjadi kawasan industri. Ini dibukti kan dengan adanya rencana pembangunan Kawasan Industri Tenayan yang akan dibangun pada Kecamatan Tenayan Raya yang telah dimuat pada draft RTRW Kota Pekanbaru tahun 2013. Tentunya pengembangan Kecamatan Tenayan Raya akan memiliki potensi dan permasalahan yang akan mendorong atau pun menghambat dalam proses pelaksanaannya. Maka dari itu peneliti merasa perlu adanya

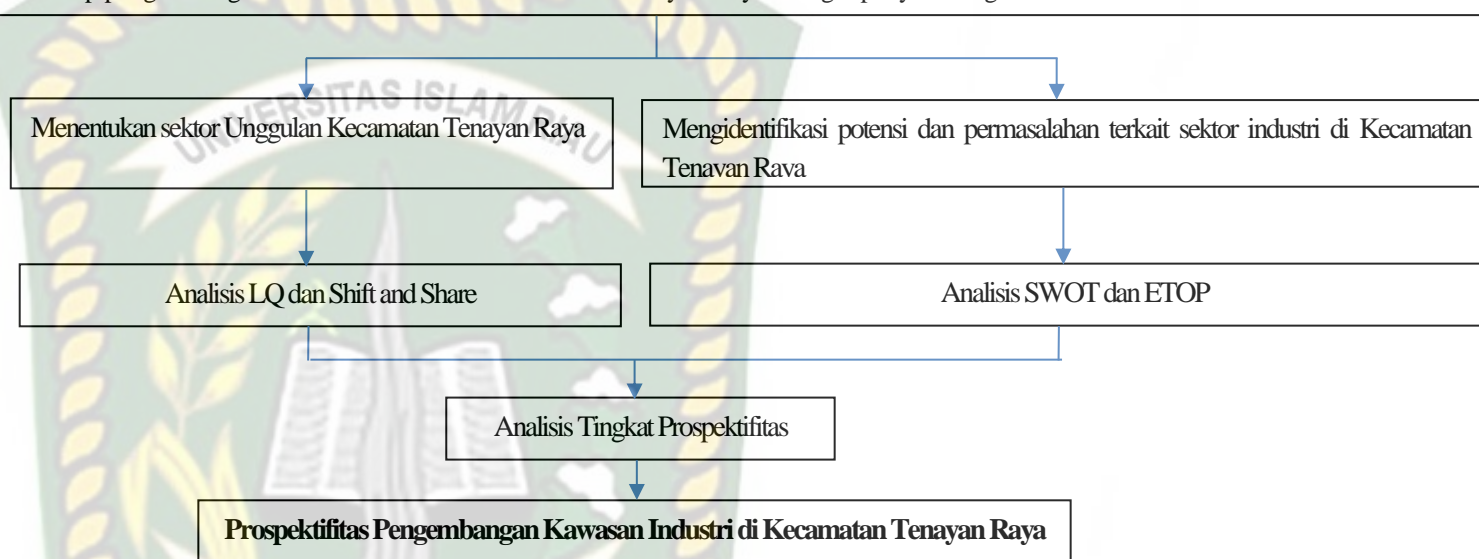
identifikasi potensi dan permasalahan yang berkaitan dengan kawasan industri guna mengetahui prospek pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya.

3. Sektor industri memiliki potensi yang besar sebagai penyumbang PAD di Kota Pekanbaru. Hal ini ditunjukkan dengan sektor industri yang berada pada urutan ketiga dalam menyumbang pendapatan Kota Pekanbaru dilihat pada *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018 (Pekanbaru dalam angka tahun 2019). Untuk itu perlu adanya pengukuran tingkat prospektifitas yang ada terhadap pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya sebagai penyumbang PAD di Kota Pekanbaru.



## 1.6 Kerangka Berfikir

- Kecamatan Tenayan Raya memiliki jumlah industri terbesar di Kota Pekanbaru, yaitu sebanyak 866 industri yang mencakup industri mikro atau kecil, industri sedang, dan industri besar. Mengingat industri adalah salah satu sektor yang berpotensi menyumbang pendapatan yang cukup besar untuk Kota Pekanbaru, yang belum secara optimal dapat dimanfaatkan. Hal ini dapat dilihat dari posisi sektor industri yang masih berada pada posisi ketiga dalam penyumbang pendapatan di Kota Pekanbaru.
- Kecamatan Tenayan Raya memiliki potensi untuk di kembangkan menjadi kawasan industri. Ini dibukti kan dengan adanya rencana pembangunan Kawasan Industri Tenayan yang akan dibangun pada Kecamatan Tenayan Raya yang telah dimuat pada draft RTRW Kota Pekanbaru tahun 2013. Tentunya pengembangan Kecamatan Tenayan Raya akan memiliki potensi dan permasalahan yang akan mendorong atau pun menghambat dalam proses pelaksanaannya.
- Sektor industri memiliki potensi yang besar sebagai penyumbang PAD di Kota Pekanbaru. Hal ini ditunjukkan dengan sektor industri yang berada pada urutan ketiga dalam menyumbang pendapatan Kota Pekanbaru dilihat pada *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018 (Pekanbaru dalam angka tahun 2019). Untuk itu perlu adanya pengukuran tingkat prospektifitas yang ada terhadap pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya sebagai penyumbang PAD di Kota Pekanbaru.



**Gambar 13 Kerangka Berfikir**

Sumber: Hasil Analisis, 2019

## 1.7 Sistematika Penulisan

Pada subbab ini akan dipaparkan mengenai sistematika penulisan proposal penelitian tugas akhir. Secara sistematis akan dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, kerangka berfikiri, serta sistematika penulisan,

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan tentang literatur yang digunakan dalam penyusunan laporan proposal tugas akhir yang berisikan berbagai bentuk teori yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Literatur serta teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan arahan yang dapat menjelaskan maksud dan tujuan mengenai tema penelitian yang diangkat,

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat mengenai metodologi penelitian yaitu pendekatan penelitian, alat penelitian, tahapan penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, variable dan desain penelitian, teknik analisis, teknik sampling, dan bagan alur penelitian. Keseluruhannya digunakan dalam penelitian dan pelaksanaan penelitian,

### **BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI**

Bab ini memuat mengenai gambaran umum Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tenayan Raya secara umum dan diteruskan dengan kondisi industri yang ada di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Tenayan Raya,



## **BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi data analisis, meliputi *Location Quotient Analysis* yaitu membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau dan Pekanbaru, analisis LQ ini digunakan untuk melihat sector unggulan di Kota Pekanbaru. Selanjutnya analisis *Shift and Share* yaitu untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sector unggulan daerah dalam kaitannya dengan perekonomian wilayah acuan dalam dua atau lebih titik waktu. Selanjutnya, analisis *SWOT ETOP* untuk melihat prospektifitas pengembangan Kawasan Industri. Kemudian dari keseluruhan analisis tersebut menghasilkan hasil tingkat prospektifitas pengembangan Kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya,

## **BAB VI KESIMPULAN SARAN**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran terhadap jawaban rumusan masalah yang dibahas, serta berisikan rekomendasi dan saran penulis terhadap pemerintah, masyarakat serta peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Industri

##### 2.1.1 Pengertian Industri

Berdasarkan etimologi, kata “industri” berasal dari bahasa Inggris “*industry*” yang berasal dari bahasa Prancis kuno “*industrie*” yang berarti aktivitas atau kerajinan. Namun kini dengan perkembangan tata bahasa dan ilmu pengetahuan maka industri dapat didefinisikan secara spesifik lagi.

Menurut Djojodipuro (1994) dalam Ichسانی (2010) kumpulan perusahaan sejenis disebut industri. Industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk yang sejenis dimana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, produk akhir dan konsumen akhir. Dalam arti yang lebih luas, industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi (Kuncoro, 2007 dalam Dianiffa, 2015).

Kuwartoyo dalam Setyawati (2002), menyatakan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku dan bahan setengah jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Industri sebagai kegiatan untuk menghasilkan barang-barang secara massal, dengan mutu yang bagus untuk kemudian dijual dan diperdagangkan. Guna menjaga kemassalannya digunakan sejumlah tenaga kerja dengan peralatan, Teknik dan cara serta pola kerja tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri merupakan bentuk seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jenis industri.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan sector industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta menceah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan;
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dalam istilah ekonomi, pemaparan industri mempunyai dua pengertian yaitu yang pertama pengertian secara luas dan kedua pengertian secara sempit. Dalam pengertian yang luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dalam bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia maupun dengan tangan sehingga menjadi barang yang setengah jadi. Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2014, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan manfaat sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai manfaat dan nilai tambah.

Departemen Perindustrian mengelompokkan industri nasional Indonesia menjadi tiga kelompok besar yaitu:

a. Industri Dasar

Kelompok industri besar dibagi menjadi dua, pertama mencakup Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) yang termasuk dalam kelompok IMLD yaitu industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga dan sebagainya. Kelompok kedua yaitu Industri kimia dasar (IKD), yang termasuk dalam IKD ialah industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri silikat dan yang lainnya. Industri dasar mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu struktur industri dan bersifat padat modal serta mendorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara besar.

b. Industri Aneka (IA)

Pengolahan yang secara luas untuk berbagai sumber daya hutan, pengolahan sumber daya pertanian dan lain sebagainya termasuk dalam kategori aneka industri. Aneka industri mempunyai tujuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, tidak padat modal dan memperluas kesempatan kerja.

c. Industri Kecil

Industri kecil mencakup industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi dan barang dari kulit), industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), industri kerajinan umum (industri rotan, kayu, bambu, barang galian bukan logam), industri logam (mesin, listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dan logam dan sebagainya), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet dan plastik).

Badan Pusat Statistik menggolongkan sektor industri pengolahan di Indonesia didasarkan atas empat kategori yang berdasarkan dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan industri pengolahan dengan tidak memperhatikan seberapa besar modal yang ditanam maupun kekuatan mesin yang dipakai. Empat kategori tersebut yaitu:

- a. Industri kerajinan rumah tangga, ialah perusahaan atau usaha industri pengolahan yang memiliki pekerja 1-4 orang.
- b. Industri kecil, ialah perusahaan atau usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 5-19 orang.
- c. Industri sedang, ialah perusahaan atau usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 20-99 orang.

- d. Industri besar, ialah perusahaan atau usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih.

### 2.1.2 Industrialisasi Dalam Islam

Islam menawarkan sebuah semangat dan sikap mental agar setiap Muslim selalu berpandangan bahwa kehidupan hari esok harus lebih baik daripada hari ini dengan melalui aktivitas berkarya. Sebagaimana firman Allah dalam At- Taubah (9): 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .

(Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang -telah kamu kerjakan),<sup>13</sup> dan bahkan mendorong umat Islam untuk menjadi ‘Subjek Perubahan’.

Kesadaran untuk berkarya harus berlandaskan semangat tauhid. Sehingga semua aktivitas keseharian setiap Muslim harus diniatkan dan diorientasikan sebagai ibadah kepada Allah SWT (dalam rangka mencari keridlaan Allah SWT). Sebaliknya, setiap upaya ibadah kepada Allah harus direalisasi dalam bentuk “karya nyata” yang bernilai positif (amal shalih). Karya, bagi setiap Muslim, adalah ibadah dan ibadah merupakan implementasi dari sikap tauhid.

Muhammad Husain Haikal menceritakan bahwa Umar bin Khattab, ketika mendapati seseorang yang selalu berdoa, dan enggan berkarya, beliau pun segera menghardiknya: “Janganlah seorang dari kamu duduk dan malas mencari rizki, karena langit tidak pernah akan menghujankan emas dan perak”. Berkarya dalam pandangan Umar bin Khattab merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap

Muslim, dengan tetap mengindahkan etikanya. Jika kita berkarya dengan halal dan kita dapatkan sesuatu yang halal, dan kita manfaatkan hasil karya kita pada semua yang halal pula, maka akan kita peroleh ‘barakah’ Allah darinya.

Berkarya bagi setiap Muslim merupakan manifestasi keimanan, yang berkaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu beribadah dalam rangka memperoleh ‘ridla Allah’ Berkarya bukan sekadar bertujuan memuliakan dirinya, tetapi juga sebagai manifestasi amal shalih (karya produktif). Karenanya memiliki nilai ibadah yang sangat luhur. Penghargaan hasil karya dalam Islam kurang lebih setara dengan ‘iman’ yang tumbuh di dalam hati, bahkan berkarya dapat menjadi jaminan atas ampunan dosa, bila diniatkan dalam rangka untuk beribadah kepada-Nya. Islam selalu menyuruh umatnya untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu. Karena rahmat Allah akan diberikan kepada umat-Nya yang rajin bekerja. Hamba yang hidup sejahtera bahkan mampu membagi kesejahteraan dengan orang lain, sangat terpuji dalam Islam. Islam juga mengecam umatnya yang malas bekerja. Bahkan seorang muslim yang miskin sangat dekat dengan kekufuran.

Usaha industri adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati dalam Islam. Namun dalam berindustri, seorang muslim harus menepati aturan-aturan Islam, agar tidak menyimpang dari tujuan Islam. Lima prinsip seorang muslim dalam aktifitas ekonominya, yaitu:

- a. Tauhid uluhiyyah, adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan baik yang zhahir maupun batin.
- b. Tauhid rububiyah, adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah

Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan Pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka.

- c. Istikhlaf, adalah seluruh hart benda yang ada pada manusia, yang biasanya disebut milik kita, pada hakikatnya adalah hanya titipin dari Allah SWT. Hal ini karena seluruh yang ada di alam semesta ini merupakan milik Allah SWT.
- d. Tazkiyatu l nafs, adalah mensucikan, menguatkan dan mengembangkan jiwa sesuai dengan potensi dasarnya (fitrah) yakni potensi iman, islam dan ihsan kepada Allah.
- e. Al-falah, adalah tujuan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat.

Maka aspek utama motivasi berindustri dalam Islam adalah:

- a. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya. Seorang pengusaha Islam tidak diizinkan untuk senantiasa mengejar keuntungan semata-mata dengan alasan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diinginkan oleh agama Islam. Permasalahan yang dihadapi pengusaha sehubungan dengan rasionalitas ekonomi dan kehendak Islam adalah bahwa ia diharapkan akan bertindak untuk mendukung dan menguntungkan para konsumen disamping keuntungannya sendiri.
- b. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan.
- c. Membatasi pemaksimalan keuntungan sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip diatas.



Industri yang menyangkut kepentingan dan hajat masyarakat umum, Islam mengatur bahwa industri itu harus menjadi milik umum, tidak dikuasai pribadi.

Seperti penjelasan hadits yang diriwayatkan oleh Abyadh bin Hamal:

*“Bahwa dia meminta kepada Rasulullah untuk diberi hak mengelola tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab. Setelah dia pergi, Aqra’ bin Habis al-Tamimi bertanya: “Wahai Rasulullah, pada zaman Jahiliyah saya mengambil garam dari mana saja, Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (menyangkut kebutuhan hidup orang banyak)”. Maka Rasulullah kemudian mengambil kembali pemberian hak pengelolaan garam dari Abyadh bin Hamal. Abyadh berkata: “Saya berikan kembali tambang garam ini sebagai sadaqah dariku”. “Ya, tambang garam ini sadaqah darimu, saya ambil kembali karena tambang ini seperti air mengalir yang boleh diambil oleh siapa saja”. Hadis diatas menerangkan bahwa iqtha’ (hak pemberian Negara) kepada swasta untuk bidang-bidang yang meliputi hajat hidup orang banyak dapat ditarik kembali dan dikuasai sepenuhnya oleh Negara untuk maslahat seluruh warga Negara. Usaha-usaha selain yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dimiliki oleh pribadi.*

Dalam Islam, membangun semangat nasionalisme dapat berjalan bersama dengan pembangunan industri. Karena Islam menjamin industri yang melayani hajat hidup orang banyak akan dikuasai Negara atau diberikan haknya kepada swasta yang diyakini tidak akan merugikan rakyat. Begitu juga bidang pertanian yang melayani hajat hidup orang banyak dalam bidang pangan. Negara wajib menjamin keberlangsungan dan keberhasilan bidang pertanian. Sehingga

perindustrian terus maju, sementara bidang-bidang lain, termasuk pertanian, tidak dirugikan bahkan bisa berjalan bersama-sama dan saling mendukung.

### **2.1.3 Kawasan Industri**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kawasan Industri**

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Kawasan Industri dalam definisi tersebut merupakan tempat berlangsungnya kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Istilah kawasan industri di Indonesia masih relatif baru. Istilah tersebut digunakan untuk mengungkapkan suatu pengertian tempat pemusatan kelompok perusahaan industri dalam suatu areal tersendiri. Kawasan industri dimaksudkan sebagai padanan atas industrial estates. Sebelumnya, pengelompokan industri demikian disebut “lingkungan industri”. Menurut Djojodipuro (1994), kawasan industri (industrial estate) merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menyebutkan bahwa upaya untuk mendorong pembangunan industri perlu dilakukan melalui

pembangunan lokasi industri yaitu berupa kawasan industri. Guna mendorong percepatan pembangunan kawasan industri dimaksud, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah no 142 Tahun 2015 tentang kawasan industri, dimana setiap perusahaan industri baru setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut, wajib masuk dalam Kawasan Industri. Dasar pertimbangan mewajibkan industri baru masuk kedalam kawasan industri agar industri yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, akrab lingkungan, pengelolaan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur yang diperlukan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.

Dengan dibangunnya kawasan industri diharapkan dapat memberikan dampak sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kavling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai infrastruktur yang memadai;
2. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha;
3. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengendalikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri, pembangunan kawasan industri bertujuan untuk :

1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
2. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri; dan
4. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya, Kawasan industri merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sebagian atau seluruh bagian kawasan peruntukan industri dapat dikelola oleh satu pengelola tertentu. Dalam hal ini, kawasan yang dikelola oleh satu pengelola tertentu tersebut disebut kawasan industri. Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:

1. Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yg efisien;
2. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
3. Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan;
4. Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Kriteria umum dan kaidah perencanaan kawasan industri menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya, adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pokok tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri; serta izin udaha industri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (disempurnakan pada UU No. 32 tahun 2014 tentang Perindustrian dan selanjutnya UU No. 3 tahun 2014);
2. Pemanfaatan kawasan peuntukan industri harus sebesar-besarnya diperuntukan bagi upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan yang tercipta akibat efisiensi biaya investasi dan aglomerasi, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat. Untuk itu jenis industri yang dikembangkan harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat, seperti kemudahan akses ke bahan baku dan atau kemudahan akses ke pasar;
4. Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat di tetapkan kriteria jenis industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut;
5. Untuk mempercepat pengembangan kawasan peruntukan di dalam kawasan peruntukan industri dapat dibentuk suatu perusahaan kawasan indutri yang mengelola kawasan industri;
6. Ketentuan tentang kawasan industri diatur tersendiri melalui Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Peindustrian No. 40 tahun 2016 tentang Standar Teknis Kawasan Industri yang mengatur beberapa aspek substansi serta hak dan kewajiban

Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan Kawasan Industri;

7. Khusus untuk kawasan industri, pihak pengelolaan wajib menyiapkan kajian studi Amdal sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL.

### **2.1.3.2 Prasarana Kawasan Industri**

Arsyad (2015) menyebutkan industri tidak akan dapat berkembang tanpa adanya sektor penunjang berupa infrastruktur, misalnya pembangunan jaringan transportasi (jalan raya, rel kereta api, dan jembatan), jaringan telekomunikasi (telepon dan fax), listrik, air bersih, dan sebagainya. Penyediaan infrastruktur tersebut menjadi daya tarik utama bagi calon investor.

Dirdjojuwono (2004) menyatakan penyediaan prasarana dan sarana pada kawasan industri sekurang-kurangnya terdiri jaringan jalan dalam kawasan industri sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; saluran pembuangan air hujan (drainase) yang bermuara kepada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis Pemerintah Daerah setempat; instalasi penyediaan air bersih dan saluran distribusinya; instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang kapasitasnya dapat menampung semua limbah cair yang dihasilkan oleh industri pada kawasan tersebut; instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik (energi); jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku; unit pemadam kebakaran; unit perkantoran; perumahan; dan fasilitas sosial dan umum.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri disebutkan bahwa, pemerintah dan pengusaha kawasan industri wajib menyediakan infrastruktur kawasan industri, yaitu:

1. Pemerintah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang industry, meliputi:
  - a. Infastruktur industri, yang meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumberdaya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, dan jaringan transportasi.
  - b. Infrastruktur penunjang, yang meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah.
2. Pengusaha kawasan industri wajib menyediakan infrastruktur dasar kawasan industri, yaitu meliputi instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, saluran drainase, instalasi penerangan jalan, dan jaringan jalan. Pengusaha kawasan industri dapat menyediakan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang dalam kawasan industri.

### **2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Industri**

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, diperlukan beberapa prinsip dalam pengembangan kawasan industri, yaitu:

1. Kesesuaian Tata Ruang

Pemilihan, penetapan dan penggunaan lahan untuk kawasan industri harus sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, mauoun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kesesuaian tata ruang merupakan landasan pokok bagi pengembangan kawasan industri yang akan menjamin kepastian pelaksanaan pembangunannya.

## 2. Ketersediaan Prasarana dan Sarana

Pengembangan suatu kawasan industri mempersyaratkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan suatu kawasan industri perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana, seperti:

- a. Tersedianya akses jalan yang dapat memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri;
- b. Tersedianya sumber energi (gas, listrik) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri baik dalam hal ketersediaan, kualitas, kuantitas dan kepastian pasokan;
- c. Tersedianya sumber air sebagai air baku industri baik yang bersumber dari air permukaan, PDAM, air tanah dalam; dengan prioritas utama yang berasal dari air permukaan yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri (*Water Treatment Plant*);
- d. Tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan telepon dan komunikasi data;
- e. Tersedianya fasilitas penunjang lainnya seperti kantor pengelola, unit pemadam kebakaran, bank, kantor pos, poliklinik, kantin, sarana ibadah, perumahan karyawan industri, pos keamanan, sarana olahraga/kesegaran jasmani, halte angkutan umum, dan sarana penunjang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.



### 3. Ramah lingkungan

Dalam pengembangan kawasan industri, pengelola kawasan industri wajib melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana kawasan industri wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Fungsi AMDAL untuk (a) memberi masukan dalam pengambilan keputusan, (b) memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak/lingkungan hidup dan (c) memberi informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Sedangkan AMDAL memberikan manfaat untuk (a) mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek, (b) menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan, (c) menghemat penggunaan sumber daya alam dan (d) kemudahan dalam memperoleh kredit bank.

### 4. Efisiensi

Aspek efisiensi merupakan landasan pokok dalam pengembangan kawasan industri. Bagi pengguna kavling (user) akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah tertata dengan baik dimana terdapat beberapa keuntungan seperti bantuan proses perijinan, ketersediaan prasarana dan sarana. Sedangkan bagi pemerintah daerah akan menjadi lebih efisien dalam perencanaan pembangunan prasarana yang mendukung dalam pengembangan kawasan industri.

### 5. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha

Situasi dan kondisi keamanan yang stabil merupakan salah satu jaminan bagi keberlangsungan kegiatan kawasan industri. Untuk itu diperlukan adanya

jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha dari gangguan keamanan seperti gangguan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tindakan anarkis dan gangguan lainnya terhadap kegiatan industri. Dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan berusaha, Pengelola kawasan industri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan/atau pihak keamanan. Apabila dipandang perlu, pemerintah dapat menetapkan suatu kawasan industri sebagai objek vital untuk mendapatkan perlakuan khusus. Faktor keselamatan merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kawasan industri, sehingga perlu memperhatikan hal-hal yang menyangkut Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja yang berlaku.

#### **2.1.3.4 Kriteria Lokasi Kawasan Industri**

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, berkembangannya suatu kawasan industri tidak terlepas dari pemilihan lokasi kawasan industri yang akan dikembangkan, karena sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor/variable di wilayah lokasi kawasan. Selain itu dengan dikembangkannya suatu kawasan industri juga akan memberikana dampak terhadap beberapa fungsi di sekitar lokasi kawasan. Oleh sebab itu, beberapa kriteria menjadi pertimbangan di dalam pemilihan lokasi kawasan industri, antara lain:

- 1. Jarak ke Pusat Kota.** Pertimbangan jarak ke pusat kota bagi lokasi kawasan industri adalah dalam rangka kemudahan memperoleh fasilitas pelayanan baik sarana dan prasarana maupun segi-segi pemasaran. Mengingat pembangunan suatu kawasan industri tidak harus membangun

seluruh system prasarana dari mulai tahap awal melainkan memanfaatkan system yang telah ada seperti listrik, air bersih yang biasanya telah tersedia di lingkungan perkotaan, dimana kedua system ini kestabilan tegangan (listrik) dan tekanan (air bersih) dipengaruhi faktor jarak, disamping fasilitas banking, kantor-kantor pemerintahan yang memberikan jasa pelayanan bagi kegiatan industri yang pada umumnya berlokasi di pusat perkotaan, maka idealnya suatu kawasan industri berjarak minimal 10 km dari pusat kota.

**2. Jarak terhadap Permukiman.** Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi industri, pada prinsipnya memiliki dua tujuan pokok, yaitu:

- a. Berdampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan aspek pemasaran produk. Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan adanya kebutuhan tambahan akan perumahan sebagai akibat dari pembangunan kawasan industri. Dalam kaitannya dengan jarak terhadap permukiman disini harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan, dimana sering terjadi areal tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan tidak ada lagi jarak antara perumahan dengan kegiatan industri.
- b. Berdampak negatif karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat.
- c. Jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 (dua) Km dari lokasi kegiatan industri.

3. **Jaringan jalan yang melayani.** Jaringan bagi kegiatan industri memiliki fungsi yang sangat penting terutama dalam rangka kemudahan mobilitas pergerakan dan tingkat pencapaian (aksesibilitas) baik dalam penyediaan bahan baku, pergerakan manusia dan pemasaran hasil-hasil produksi. Jaringan jalan yang baik untuk kegiatan industri, harus memperhitungkan kapasitas dan jumlah kendaraan yang akan melalui jalan tersebut sehingga dapat diantisipasi sejak awal kemungkinan terjadinya kerusakan jalan dan kemacetan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dari kenyataan yang ada dari keberadaan kawasan industri pada suatu daerah ternyata tidak mudah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industri terhadap masalah transportasi. Apabila hal ini kurang mendapat perhatian akan berakibat negatif terhadap upaya promosi kawasan industri. Untuk pengembangan kawasan industry dengan karakteristik lalu lintas truk kontainer dan akses utama dari dan ke pelabuhan/bandara, maka jaringan jalan arteri primer harus tersedia untuk melayani lalu lintas kegiatan industri.
4. **Jaringan fasilitas dan prasarana.** Jaringan fasilitas dan prasarana dalam suatu kawasan industri adalah sebagai berikut:
  - a. Jaringan listrik. Ketersediaan jaringan listrik menjadi syarat yang penting untuk kegiatan industri. Karena bias dipastikan proses produksi kegiatan industri sangat membutuhkan energi yang bersumber dari listrik, untuk keperluan mengoperasikan alat-alat produksi. Dalam hal ini standar pelayanan listrik untuk kegiatan industri tidak sama dengan kegiatan domestik dimana ada prasyarat mutlak untuk kestabilan

pasokan daya maupun tegangan. Kegiatan industri umumnya membutuhkan energi listrik yang sangat besar, sehingga perlu dipikirkan sumber pasokan listriknya, apakah yang bersumber dari perusahaan listrik negara saja, atau dibutuhkan partisipasi sector swasta untuk ikut membantu penyediaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik industri.

- b. Jaringan Telekomunikasi. Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis dalam rangka pemasaran maupun pengembangan usaha. Untuk itulah jaringan telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga ketersediaan jaringan telekomunikasi tersebut menjadi syarat dalam penentuan lokasi industri.
- c. Pelabuhan laut. Kebutuhan prasarana pelabuhan menjadi kebutuhan yang mutlak, terutama bagi kegiatan pengiriman bahan baku/bahan penolong dan pemasaran produksi, yang berorientasi ke luar daerah dan keluar negeri (ekspor/impor). Kegiatan industri sangat membutuhkan pelabuhan sebagai pintu keluar-masuk berbagai kebutuhan pendukung. Sebagai ilustrasi untuk memproduksi satu produk membutuhkan banyak bahan pendukung yang tidak mungkin dipenuhi seluruhnya dari dalam daerah/wilayah itu sendiri, misalnya kebutuhan peralatan mesin dan komponen produksi lainnya yang harus diimport, demikian pula produk yang dihasilkan diharapkan dapat dipasarkan di luar wilayah/ekspor agar diperoleh nilai tambah/devisa. Untuk itu maka keberadaan

pelabuhan/outlet menjadi syarat mutlak untuk pengembangan kawasan industri.

5. **Topografi.** Pemilihan lokasi peruntukan kegiatan industri hendaknya pada areal lahan yang memiliki topografi yang relatif datar. Kondisi topografi yang relatif datar akan mengurangi pekerjaan pematangan lahan (*cut and fill*) sehingga dapat mengefisienkan pemanfaatan lahan secara maksimal memudahkan pekerjaan konstruksi dan menghemat biaya pembangunan. Topografi/kemiringan tanah maksimal 15%.
6. **Jarak terhadap sungai atau sumber air bersih.** Pengembangan kawasan industri sebaiknya mempertimbangkan jarak terhadap sungai. Karena sungai memiliki peranan penting untuk kegiatan industri yaitu sebagai sumber air baku dan tempat pembuangan akhir limbah industri. Sehingga jarak terhadap sungai harus mempertimbangkan biaya konstruksi dan pembangunan saluran-saluran air. Disamping itu jarak yang ideal seharusnya juga memperhitungkan kelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga kegiatan industri dapat secara seimbang menggunakan sungai untuk kebutuhan kegiatannya tetapi juga dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut. Jarak terhadap sungai atau sumber air bersih maksimum 5 (lima) Km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV.
7. **Kondisi lahan.** Peruntukan lahan industri perlu mempertimbangkan daya dukung lahan dan kesuburan lahan.

- a. Daya Dukung Lahan. Daya dukung lahan erat kaitannya dengan jenis konstruksi pabrik dan jenis produksi yang dihasilkan. Jenis konstruksi pabrik sangat dipengaruhi oleh daya dukung jenis dan komposisi tanah, serta tingkat kelabilan tanah, yang sangat mempengaruhi biaya dan teknologi konstruksi yang digunakan. Mengingat bangunan industri membutuhkan fondasi dan konstruksi yang kokoh, maka agar diperoleh efisiensi dalam pembangunannya sebaiknya nilai daya dukung tanah (sigma) berkisar antara : 0,7-1,0 kg/cm<sup>2</sup>.
  - b. Kesuburan lahan. Tingkat kesuburan lahan merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi peruntukan kawasan industri. Apabila tingkat kesuburan lahan tinggi dan baik bagi kegiatan pertanian, maka kondisi lahan seperti ini harus tetap dipertahankan untuk kegiatan pertanian dan tidak dicalonkan dalam pemilihan lokasi kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konversi lahan yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas pertanian, sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi masyarakat dan dalam jangka panjang sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan (*food security*) di daerah-daerah. Untuk itu dalam pengembangan industri, pemerintah daerah harus bersikap tegas untuk tidak memberikan ijin lokasi industri pada lahan pertanian, terutama areal pertanian lahan basah (irigasi teknis).
- 8. Ketersediaan lahan.** Kegiatan industri umumnya membutuhkan lahan yang luas, terutama industri-industri berskala sedang dan besar. Untuk itu skala industri yang akan dikembangkan harus pula memperhitungkan luas

lahan yang tersedia, sehingga tidak terjadi upaya memaksakan diri untuk konversi lahan secara besar-besaran, guna pembangunan kawasan industri. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2009, luas lahan kawasan industri minimal 50 hektar. Ketersediaan lahan harus memasukkan pertimbangan kebutuhan lahan di luar kegiatan sektor industri sebagai “*multiplier effects*” nya, seperti kebutuhan lahan perumahan dan kegiatan permukiman dan perkotaan lainnya. Sebagai ilustrasi bila per hektar kebutuhan lahan kawasan industri menyerap 100 tenaga kerja, berarti dibutuhkan lahan perumahan dan kegiatan pendukungnya seluas 1-1,5 Ha untuk tempat tinggal para pekerja dan berbagai fasilitas penunjang. Artinya apabila hendak dikembangkan 100 Ha kawasan industri disuatu daerah, maka di sekitar lokasi harus tersedia lahan untuk fasilitas seluas 100-150 Ha, sehingga total area dibutuhkan 200-250 Ha.

- 9. Harga lahan.** Salah satu faktor utama yang menentukan pilihan investor dalam memilih lokasi peruntukan industri adalah harga beli/sewa lahan yang kompetitif, artinya bila lahan tersebut dimatangkan dalam arti sebagai kapling siap bangun yang telah dilengkapi prasarana penunjang dapat dijangkau oleh para pengguna (user). Dengan demikian maka dalam pemilihan lokasi kawasan industri sebaiknya harga lahan (tanah mentah) tidak terlalu mahal. Disamping itu sebagai syarat utamanya agar tidak terjadi transaksi lahan yang tidak adil artinya harga yang tidak merugikan masyarakat pemilik lahan, atau pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat menanamkan modal dalam investasi kawasan industri melalui lahan yang dimilikinya.



Sehingga dengan demikian membuka peluang bagi masyarakat pemilik lahan untuk merasakan langsung nilai tambah dari keberadaan kawasan industri di daerahnya.

**10. Orientasi lokasi.** Mengingat kawasan industri sebagai tempat industri manufaktur (pengolahan) yang biasanya merupakan industri yang bersifat “*footloose*” maka orientasi lokasi sangat dipengaruhi aksesibilitas dan potensi tenaga kerja.

**11. Pola tata guna lahan.** Mengingat kegiatan industri disamping menghasilkan produksi juga menghasilkan hasil sampingan berupa limbah padat, cair dan gas, maka untuk mencegah timbulnya dampak negatif sebaiknya dilokasikan pada lokasi yang non pertanian dan non permukiman, terutama bagi industri skala menengah dan besar.

**12. Multiplier Effects.** Pembangunan kawasan industri jelas akan memberikan pengaruh eksternal yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Dengan istilah lain dapat disebut sebagai *multiplier effects*.

Secara ringkas kriteria pemilihan lokasi kawasan industri dan lokasi industri dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penentuan Lokasi Industri**

No.	Kriteria Pemilihan Lokasi	Faktor Pertimbangan
1	Jarak ke pusat kota	Minimal 10 Km
2	Jarak terhadap permukiman	Minimal 2 (dua) Km
3	Jaringan jalan yang melayani	Arteri primer
4	Sistem jaringan yang melayani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan listrik</li> <li>• Jaringan telekomunikasi</li> </ul>
5	Prasarana angkutan	Tersedianya pelabuhan laut sebagai outlet (ekspor/import)
6	Topografi/kemiringan tanah	Minimal 15%
7	Jarak terhadap sungai	Maks 5 (lima) Km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV
8	Daya dukung lahan	Sigma tanah 0,7-1,0 kg/cm
9	Kesuburan tanah	Relatif tidak subur (non irigasi teknis)
10	Peruntukan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non pertanian</li> <li>• Non permukiman</li> <li>• Non konservasi</li> </ul>
11	Ketersediaan lahan	Minimal 50 Ha
12	Harga lahan	Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut)
13	Orientasi lokasi	Aksesibilitas tinggi

No.	Kriteria Pemilihan Lokasi	Faktor Pertimbangan
14	<i>Multiplier Effects</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekat dengan potensi tenaga kerja</li> <li>• Bangkitan lalu lintas = 5,5 smp/ha/hari</li> <li>• Kebutuhan lahan industri dan multipliernya = 2 x luas perencanaan KI</li> <li>• Kebutuhan rumah (1,5 TK – 1 KK)</li> <li>• Kebutuhan Fasum dan Fasos</li> </ul>

Sumber: Permenperind No. 40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri

### 2.1.3.5 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri

Didalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, menyatakan bahwa pengembangan kawasan industri memerlukan suatu perencanaan yang matang dan komprehensif untuk dapat memberikan manfaat secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam rencana pembangunan suatu kawasan industri yaitu sebagai berikut:

1. **Tahap Persiapan,** Terdiri atas kelayakan lokasi dilihat, yaitu melihat potensi yang dapat memprediksikan sejauh mana lokasi tersebut berpotensi untuk dikembangkan selanjutnya. Kesesuaian lokasi terhadap rencana tata ruang setempat, penyusunan dokumen perencanaan seperti AMDAL, AMDAL-LALIN, UKL-UP, *Masterplan*, *Detail Engginering Design* (DED) dan pengurusan perizinan.

2. **Tahap Pembangunan**, meliputi pembebasan lahan, pematangan lahan, dan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang.
3. **Tahap Pengelolaan**, meliputi pembentukan kelembagaan dan pengoperasian kawasan industri.

#### **2.1.3.6 Proses Perizinan Terkait dengan Rencana Pengembangan Kawasan Industri**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 142 tahun 2015 tentang kawasan industri dan sehubungan dengan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terdapat beberapa jenis perizinan yang terkait dengan pengembangan kawasan industri yang akan disiapkan oleh perusahaan kawasan industri, perizinan tersebut meliputi:

1. **Izin Lingkungan.** Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. **Persetujuan Prinsip.** Persetujuan prinsip merupakan persetujuan awal terhadap rencana investasi yang akan ditanamkan oleh perusahaan kawasan industri dalam usaha pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Persetujuan prinsip diajukan kepada Sekjen Diperindag dan bagi perusahaan kawasan industri berstatus non PMA/PMDN dan kepada ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) bagi yang berstatus PMA/PMDN. Persetujuan prinsip berlaku selama jangka waktu 3 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing selama 1 tahun.

**3. Izin lokasi.** Perusahaan kawasan industri yang telah memperoleh persetujuan prinsip wajib memperoleh izin lokasi kawasan industri dengan mengajukan permohonan kepada:

- a. Bupati/Walikota untuk kawasan industri yang lokasinya di wilayah satu kabupaten/kota;
- b. Gubernur untuk kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota; atau
- c. Kepala Badan Pertahanan Nasional untuk kawasan industri yang lokasinya lintas provinsi.

Pemberian izin lokasi kawasan industri kepada perusahaan kawasan industri dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah setempat. Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu selama 12 bulan dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk selama 12 bulan. Izin lokasi dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembebasan tanah. Izin lokasi akan mengatur mengenai luas lahan yang diperbolehkan untuk di kembangkan sebagai kawasan industri.

**4. Izin usaha kawasan industri.** Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 39 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atas permohonan perusahaan kawasan industri yang telah dilengkapi dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Telah memiliki rencana tapak tanah (site plan) kawasan industri yang dimohon dan telah disahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- b. Telah menyelesaikan pembelian tanah sesuai izin lokasinya;
- c. Telah menyelesaikan kewajiban membuat Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (RKL), dan upaya pemantauan lingkungan (RPL) kawasan industri yang telah disetujui Menteri.
- d. Telah membuat tata tertib kawasan industri, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan kawasan industri, yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan kawasan industri, perusahaan pengelola kawasan industri dan perusahaan industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan industri.
- e. Telah siap dioperasikannya sebagian dari prasarana kawasan industri sekurang-kurangnya meliputi jalan masuk ke kawasan industri, jaringan jalan dan saluran air hujan dalam kawasan industri serta instalasi pengeolahan air limbah bagi kawasan industri dengan AMDAL nya.

Setelah memiliki izin usaha kawasan industri, perusahaan kawasan industri harus menyelesaikan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan industri secara lengkap sebagai berikut:

- a. Prasarana kawasan industri meliputi: jaringan jalan; saluran air hujan; instalasi penyediaan air bersih; instalasi/jaringan distribusi dan pembangkit tenaga listrik; jaringan distribusi telekomunikasi; saluran pengumpulan limbah industri; instalasi pengolahan air limbah; penampungan sementara

limbah padat; penerangan jalan; unit pemadam kebakaran dan pagar kawasan industri.

- b. Sarana penunjang kawasan industri meliputi: kantor pengelola; bank; jasa pelayanan pos; kantor pelayanan telekomunikasi; poliklinik; kantin; sarana ibadah; perumahan karyawan industri; mess transito; pos keamanan; sarana kesegaran jasmani; halte angkutan umum dan fasilitas penunjang lainnya.

Izin usaha kawasan industri bagi perusahaan kawasan industri yang berstatus non-PMA/PMDN dan yang berstatus PMDN, berlaku selama perusahaan kawasan industri yang bersangkutan melakukan kegiatan pengusahaan kawasan industri. Sedangkan bagi perusahaan kawasan industri yang berstatus PMA berlaku untuk 30 (tiga puluh) tahun sepanjang masih memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. **Hak Guna Bangunan (HGB).** HGB diajukan jika tanah-tanah sudah dibebaskan dari pemilik awalnya. Permohonan hak guna bangunan (HGU) dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilakukan permohonan HGU induk untuk keseluruhan kawasan industri. Tahap berikutnya diajukan permohonan HGU untuk masing-masing kaveling industri. Dalam mengajukan HGB induk harus dilampiri adanya Keterangan Rencana Kota (KRK) yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota. HGB induk kawasan industri ini nantinya apabila tanah telah terjual ke para investor akan dilakukan pemecahan menjadi persil-persil HGB atas nama masing-masing investor. Setelah perusahaan kawasan industri mengantongi HGB induk kawasan industri, perusahaan kawasan industri diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan fisik

lainnya yaitu pematangan tanah dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan industri.

6. **Izin mendirikan bangunan (IMB).** Perusahaan industri yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjangnya wajib mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB). Permohonan IMB diajukan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas PU/Dinas Tata Kota setempat.
7. **Izin perluasan kawasan industri.** Izin perluasan kawasan industri diajukan setelah perusahaan kawasan industri memperoleh izin usaha kawasan industri (IUKI) dan telah beroperasi. Apabila perusahaan kawasan industri merasa perlu melakukan perluasan kawasan, maka diharuskan mengajukan izin perluasan kawasan industri.

#### 2.1.3.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kawasan Industri

Perkembangan suatu kawasan industri dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dalam hal ini faktor tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: (Praktiknya, 2007),

1. **Faktor Intern Kawasan Industri,** adalah faktor yang berasal dari dalam kawasan industri sendiri yang dapat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya perkembangan kawasan industri, faktor tersebut antara lain:
  - a. **Faktor lokasi,** yang dimaksud faktor lokasi dalam hal ini adalah letak suatu kawasan industri dalam suatu daerah tertentu, letak ini sangat berpengaruh terhadap minat investor, mengingat dalam kegiatan industrinya para investor akan membutuhkan kemudahan, yang menyangkut faktor lokasi meliputi jarak kawasan industri dari berbagai



sarana di perkotaan seperti dari pelabuhan laut, bandar udara, pusat pemerintahan, bebas banjir, bebas macet, terdapat akses jalan menuju jalan utama yang menghubungkan kota-kota besar, dan lokasi kawasan industri berada dalam daerah industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- b. **Permodalan**, permodalan merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan kawasan industri, dengan modal yang cukup maka pembangunan kawasan industri dapat berjalan dengan lancar, hal ini adalah sesuatu yang wajar karena membangun suatu kawasan industri memerlukan investasi yang sangat besar, mulai dari pembebasan tanah, pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas, dan operasionalnya. Semua itu harus di tanggung sendiri oleh pengembang kawasan industri, tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Sehingga bagi perusahaan kawasan industri hal ini merupakan sesuatu yang sangat berat, sehingga diperlukan adanya fasilitas pendanaan dari perbankan dengan memberikan insentif bagi perusahaan kawasan industri, fasilitas ini dapat berupa kemudahan bagi perusahaan kawasan industri untuk meminta dana pinjaman. Apabila fasilitas ini diberikan akan membantu meringankan beban pengembang kawasan industri dalam memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan dan pengembangan kawasan industri guna menciptakan kawasan industri yang lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh investor dalam menjalankan kegiatan industrinya.

- c. **Kelengkapan Fasilitas**, kelengkapan fasilitas dalam kawasan industri, sangat berpengaruh terhadap perkembangan kawasan industri, kawasan industri yang menyediakan fasilitas yang lengkap akan menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke dalam kawasan industri tersebut, sehingga pemasaran kawasan industri menjadi mudah dan kawasan industri akan cepat berkembang dengan dapat terjualnya kavling-kavling industri dan tersewanya bangunan siap pakai yang disediakan oleh suatu kawasan industri. Fasilitas standar yang harus disediakan oleh suatu kawasan industri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri maupun Peraturan Menteri Perindustrian No. 40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.
- d. **Promosi**, selain dari faktor lokasi, permodalan, dan kelengkapan fasilitas, yang tak kalah penting bagi perkembangan kawasan industri adalah faktor promosi, keberadaan suatu kawasan industri tidak akan diketahui atau dikenal dikalangan investor apabila tidak dilakukan upaya promosi, promosi di sini dilakukan dengan tujuan memperkenalkan keberadaan kawasan industri dan sekaligus upaya menarik investor agar mau menanamkan modalnya di dalam kawasan industri. Mengingat suatu kawasan industri diperuntukan bagi perusahaan PMA maupun PMDN, maka dalam berpromosi, kawasan industri melakukan tidak hanya pada tingkat nasional melainkan juga tingkat internasional. Dengan demikian dalam hal promosi ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, mengingat sebagian besar promosi kawasan industri di lakukan sendiri

oleh perusahaan kawasan industri, walaupun ada bantuan promosi dari pemerintah sifatnya hanya merupakan sampingan dan biasanya bukan tujuan utama untuk mempromosikan kawasan industri tetapi lebih mempromosikan potensi suatu daerah secara umum, meskipun apabila ada investor masuk suatu kawasan industri, dalam jangka panjang yang diuntungkan adalah pemerintah khususnya pemerintah daerah dimana kawasan industri berada.

## 2. Faktor Ekternal Kawasan Industri, meliputi:

- a. **Iklm investasi.** Kawasan industri dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh iklim investasi, hal ini dapat dimaklumi bahwa suatu kawasan industri tidak akan dapat beroperasi kalau tidak ada investor yang mau membangun pabrik di dalam kawasan industri. Dengan demikian berkembangnya kawasan industri juga terkait dengan minat para investor tertarik menanamkan modalnya di suatu daerah dimana kawasan industri dibangun. Sedangkan minat investor untuk mau menanamkan modal di suatu wilayah atau daerah tergantung dengan baik tidaknya iklim investasi di daerah/wilayah tersebut. Iklim investasi di katakana baik atau kondusif apabila para calon investor dapat merealisasikan investasinya di suatu daerah dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan yang berarti yang meliputi kurun waktu mulai dari proses perizinan sampai dengan operasional usahanya dan kelangsungan hidup usahanya sehingga tujuan utama sejak awal melakukan investasi untuk mencari keuntungan dapat tercapai.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ada lima kendala yang mengakibatkan iklim investasi di Indonesia belum kondusif, yaitu :

- i. Pertama, soal proses perizinan investasi di Indonesia dinilai sangat lama dan berbelit-belit. Langkah yang diusulkan BKPM mengatasi lamanya proses perizinan ini adalah menghapus semua perizinan atau tetap memberlakukan izin tetapi ada pihak yang di tunjuk menjadi penanggung jawab. Untuk perizinan di daerah, pemerintah pusat harus menetapkan batas waktunya. Jika tidak tepat waktu pemerintah pusat harus segera mengambilnya.
- ii. Kedua adalah tidak adanya *rules of law*. Penyelesaian tatanan hokum ini sangatlah penting dalam menciptakan iklim investasi.
- iii. Ketiga, masalah pemutusan hubungan kerja. Harus ada terobosan riil untuk implementasi Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bagi BPKM, kondisi-kondisi ini mesti dilaksanakan. Dalam konteks ketenagakerjaan, jika tidak segera memberikan terobosan riil berupa safeguard untuk memberikan rasa aman, investor dalam maupun luar negeri bias angkat kaki. Jangankan untuk menarik investor lama pun bias kabur.
- iv. Keempat, masalah infrastruktur. Infrastruktur di Indonesia sudah berada pada titik nadir dan sangat sulit. Infrastruktur kita tidak terletak pada dasar, sehingga tidak terjadi distribusi investasi yang sehat.
- v. Kelima adalah masalah intensif, undang-undang investasi tahun 1967 jelas sekali ditunjukkan aturan intensifnya kepada daerah yang

menggalakkan ekspor usaha strategis. Namun setelah tahun 1984, sebagian besar hasil bumi di Indonesia diproses di Singapura terlebih dahulu, sebelum didistribusikan ke semua negara. Menyadari bahwa iklim investasi akan memacu investasi di Indonesia, maka pemerintah pada tahun 2006 memprioritaskan perbaikan iklim investasi. Perbaikan iklim iklim investasi yang akan dilakukan antara lain menyatakan perang terhadap korupsi. Itu dilakukan tidak hanya melalui tindakan keras melawan korupsi, tetapi juga dengan meningkatkan integritas pejabat pemerintah, baik yang ada di daerah maupun pusat. Di bidang perpajakan, pemerintah melakukan perbaikan pada sistem perpajakan, antara lain pajak penghasilan perusahaan akan dikurangi secara bertahap sehingga tahun 2010 tinggal 25 persen. Dengan ini diharapkan system perpajakan di Indonesia bias kompetitif. Jaminan investasi di Indonesia dinilai semakin memburuk karena rendahnya daya saing yang disebabkan oleh masalah-masalah insentif pajak, masalah perburuan, pelayanan birokrasi. Disamping itu juga masalah sosial politik dan keamanan yang kurang kondusif untuk berinvestasi. Penegakan hukum yang belum menjamin terwujudnya kepastian hukum serta semakin menurunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah menjadi penyebab terhambatnya investasi asing masuk ke Indonesia.

- b. Dukungan Pemerintah.** Secara teknis kawasan industri lebih terintegrasi dan tertata apabila dibandingkan lokasi di luar kawasan industri. Hal ini tentunya lebih berpotensi untuk menarik minat investor. Namun untuk

mengajak investor masuk ke suatu kawasan industri bukan sesuatu yang mudah. Faktor yang mempengaruhinya di antaranya harga tanah di dalam kawasan industri umumnya lebih mahal dibanding diluar, sehingga dapat mengakibatkan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mendorong pengembangan kawasan industri pemerintah harus memberikan dukungan. Dukungan dari pemerintah dapat berupa stimulan yang diberikan kepada pengembang/pengusaha kawasan industri maupun kepada investor yang berlokasi di dalam kawasan industri. Stimulan itu dapat berupa intensif Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau dukungan biaya pembanguna dan perawatan infrastruktur, serta kemudahan-kemudahan dalam perizinan seperti pelayanan satu atap dan lain-lain yang membedakan dengan melakukan investasi dengan membangun pabrik di luar kawasan industri. Pemerintah harus membantu dengan cara mengharuskan para pengusaha yang telah memperoleh izin investasi untuk membangun pabriknya di dalam kawasan industri. Apabila ini bisa dijalankan secara konsisten akan membawa keuntungan bagi pemerintah sendiri terutama dalam penataan rencana tata ruang yang serasi serta mengamankan aspek-aspek pencemaran lingkungan seoptimal mungkin. Sedangkan bagi pengelola kawasan industri hal ini juga sangat penting mengingat yang bersangkutan terkait dengan prinsip-prinsip bisnis di dalam membangun kawasan industrinya. Apabila pemerintah tidak membantu dengan cara membiarkan pabrik-pabrik dibangun di areal luar kawasan industri, maka upaya-upaya pengelolaan kawasan industri

menjadi terganggu dan pada gilirannya akan membuat kawasan industri tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Hasil survey dari Asosiasi serikat pekerja (Aspek) Indonesia, permasalahan iklim usaha dan investasi di Indonesia adalah birokrasi dan perizinan biaya tinggi, dari survey lapangan yang dilakukan di daerah, rata-rata perusahaan mengalokasikan biaya lain-lain (*other expenses*) sebesar 19%-24% dari total biaya produksi, atau hampir dua kali lebih besar dari alokasi upah buruh yang rata-rata hanya 10%-12%. Sementara perizinan usaha di Indonesia setidaknya menghabiskan modal Rp. 10 juta. Itu belum dengan pengeluaran lain-lain jika produksi mulai berjalan, atau ketika perusahaan nanti terlibat lebih dalam dengan pemerintah.

- c. **Ketersediaan Prasarana Umum.** Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran investasi pemerintah atau pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran pemerintah untuk membiayai administrasi pemerintah, pengurusan harta benda negara seperti memperbaiki jalan lama, memelihara Gedung pemerintah dan sebagainya dan membiayai tersedianya fasilitas sosial untuk keperluan penduduk. Sedangkan pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang akan menambah modal sosial masyarakat yaitu barang-barang modal yang akan digunakan oleh masyarakat seperti jalan-jalan, pelabuhan dan jaringan jalan kereta api di dalam negara tersebut. Kedua jenis pengeluaran pemerintah ini sangat penting artinya dalam menentukan lajunya pembangunan daerah karena pengeluaran tersebut besar pengaruhnya terhadap kegiatan sektor lain dalam sesuatu daerah.

Tetapi pengaruh yang paling nyata dalam pembangunan daerah terutama berasal dari pengeluaran pembangunan, karena pengeluaran pembangunan akan memperbesar jumlah prasarana yang tersedia disuatu daerah dan sebagai akibatnya daerah tersebut akan menjadi lebih menarik sebagai tempat untuk mengadakan penanaman modal (investasi). Dengan adanya pengeluaran pemerintah disuatu daerah, prasarana umum yang penting artinya bagi industri seperti penyediaan tenaga air dan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pengangkutan dan fasilitas pelabuhan akan bertambah baik keadaannya. Perbaikan dalam fasilitas-fasilitas tersebut menyebabkan perusahaan industri dapat dengan mudah dan murah memperoleh air dan tenaga listrik yang diperlukannya, memperoleh dan mengangkut bahan mentahnya dan menjual hasil produksinya ke berbagai pasar di dalam maupun luar daerah tersebut. Dengan demikian perbaikan prasarana akan membantu mempertinggi efisiensi berbagai industri. Kegagalan suatu daerah untuk menarik modal ke daerahnya seringkali bukan disebabkan oleh terbatasnya pasar atau kekurangan bahan mentah maupun tenaga kerja, tetapi karena kekurangan berbagai jenis prasarana yang tersedia di daerah tersebut. Fasilitas pelabuhan dan pengangkutan yang kurang memadai, buruknya jaringan pengangkutan, dan kurang sempurnanya keadaan komunikasi seringkali menyebabkan penanam modal enggan untuk mengeksploiter modalnya disuatu daerah. Ketiadaan prasarana mempertinggi resiko atau kemungkinan kegagalan usaha tersebut. Berarti, industrialisasi daerah



tidak mungkin tercapai apabila pemerintah gagal untuk menyediakan prasarana yang cukup memadai.

### **2.1.3.8 Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembangan Kawasan Industri**

Menurut Alwi et.al (2001), kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dasar rencana pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pemerintahan, organisasi dan lain sebagainya dan juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan juga diartikan garis besar haluan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat sistem administrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman perilaku oleh para pelaku kebijakan (termasuk kelompok sasaran didalamnya) baik dalam berfikir maupun dalam bertindak, sehingga akan terlaksana kegiatan-kegiatan yang terarah pada pencapaian tujuan kebijakan.

Bentuk-bentuk kebijakan dapat berupa tertulis atau tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, dan sebagainya. Kebijakan tidak tertulis berbentuk ucapan yang dikatakan oleh penentu kebijakan dalam lingkup jabatannya, janji pengambil kebijakan, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang terkait dengan pengembangan sektor industri dan lokasi industri, antara lain:

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang perindustrian,
2. Peraturan Pemerintah nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri,
3. Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional,

4. Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur,
5. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 39 tahun 2016 tentang tata cara pemberian izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan,
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 40 tahun 2016 tentang pedoman teknis pembangunan kawasan industri,
7. Keppres nomor 33 tahun 1990 tentang penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri,
8. Kebijakan Sektor yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,
9. Kebijakan Keruangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,
10. Kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan lokasi industri baik Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

## **2.2 Sektor Unggulan**

### **2.2.1 Pengertian Sektor Unggulan**

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001).

Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan pada suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Widodo, 2006).

Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyanto, 2000). Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan.

### **2.2.2 Kriteria Penentuan Sektor Unggulan**

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu:

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.

2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

### **2.3 Teori Basis Ekonomi**

Sektor basis (sektor unggulan) pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik.

Teori basis ekonomi menurut (Arsyad, 2015) menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku

untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Kelemahan teori ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antar jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

Teori basis ekonomi berupaya untuk menemukan dan mengenali aktivitas basis dari suatu wilayah, kemudian meramalkan aktivitas itu dan menganalisis dampak tambahan dari aktivitas ekspor tersebut. Konsep kunci dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar.

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005).

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut (Tarigan, 2005). Teori basis ini digolongkan kedalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis.

Sektor basis yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar di daerah tersebut maupun luar daerah. Secara tidak langsung daerah mempunyai

kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain.

Sektor non basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian tersebut. Berdasarkan teori ini, sektor basis perlu dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Inti dari teori ini adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut.

## **2.4 Prospektifitas**

### **2.4.1 Pengertian Prospektifitas**

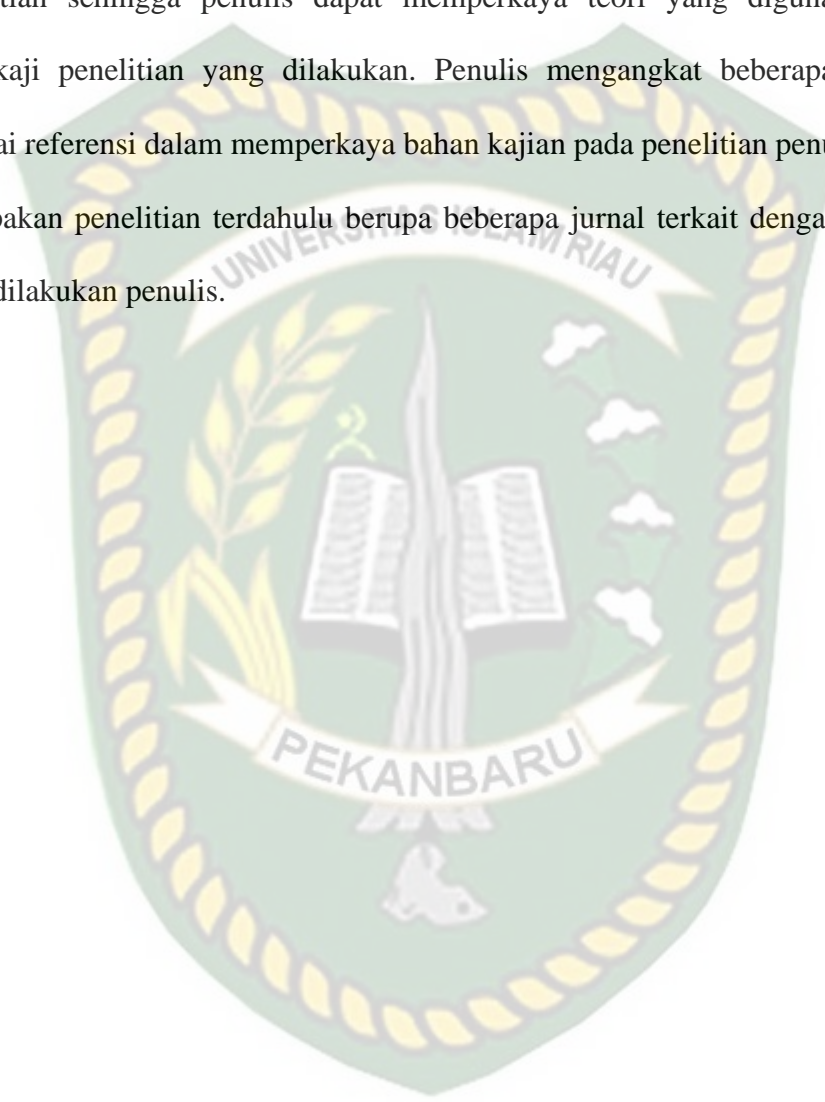
Secara umum prospektifitas merupakan peluang, secara harfiah prospektifitas berarti “melihat ke depan”. Hal ini juga dapat merujuk pada suatu peristiwa yang mungkin atau diperkirakan akan terjadi di masa depan.

Menurut kamus bahasa Indonesia, prospektifitas berasal dari kata prospek yang berarti peluang (Wikipedia, 2019). Prospektivitas merupakan suatu perkiraan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan pertimbangan dan beberapa penilaian tertentu. Menurut Paul R. Krugman dalam Suweca (2010) mengatakan bahwa prospek adalah peluang yang terjadi karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mendapatkan profit atau keuntungan.

Menurut Siswanto Sutejo dalam Suweca (2010) menyimpulkan secara jelas bahwa prospek adalah suatu gambaran keseluruhan, baik ancaman ataupun peluang dari kegiatan yang akan datang yang berhubungan dengan ketidakpastian dari aktivitas kegiatan. Selain itu juga prospek adalah gambaran keberlangsungan suatu ide di masa depan yang berupa peluang yang masih harus diadaptasikan dengan berbagai keterbatasan dan kondisi yang melingkupinya (Zakasyi, 2013).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.



**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

Penulis	Judul	Tujuan	Metode Pendekatan Studi	Hasil Studi
Lismaya Maisaroh (Jurusan Teknik Planologi, Universitas Islam Riau, Tugas Akhir, 2013).	Prospektifitas Pelabuhan Penyeberangan Ro-ro Dumai Terhadap Sektor Fisik dan Ekonomi Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat.	Mengukur tingkat prospektifitas Pelabuhan Ro-ro Dumai terhadap sektor fisik dan ekonomi Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat	1. Analisis SWOT ETOP	1. Posisi usaha pengembangan Pelabuhan Ro-ro Dumai di masa akan datang berada pada posisi menguntungkan dan matang, dan usaha pengembangan tersebut prospektif untuk dikembangkan.
			2. Analisis LQ	2. Sektor unggulan yang terbesar di Kota Dumai adalah pada pengangkutan dan komunikasi, dan peringkat kedua adalah sektor bangunan. Hal ini memiliki kesamaan perbandingan dengan sektor pengangkutan dan komunikasi yang ada di Provinsi Riau, dimana untuk Provinsi Riau, sektor yang paling besar dalam memberikan kontribusi bagi wilayahnya adalah pengangkutan dan komunikasi. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa pengembangan wilayah



Penulis	Judul	Tujuan	Metode Pendekatan Studi	Hasil Studi
				yang terdapat di Kota Dumai bersumber dari pengangkutan dan komunikasi, baik itu angkutan laut seperti pelabuhan, angkutan darat dan angkutan udara.
			3. Analisis Tata Guna Lahan	3. Penggunaan lahan terbangun di Kelurahan Pangkalan Sesai di dominasi oleh permukiman penduduk, sedangkan untuk jalan menuju lokasi pelabuhan sudah jauh lebih baik setelah adanya pelabuhan. Perubahan lahan setelah adanya pelabuhan Ro-ro Dumai yaitu untuk kawasan pelabuhan sebesar 5,4%, untuk campuran 43,9%, RTH 9,1% dan permukiman 41,6%.
Puji Astuti, Tommy Kurnia, Febby Asteriani, Mardianto (jurusan teknik Planologi, UIR, jurnal Seminar Nasional BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2018).	Prospektifitas Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.	Mengukur tingkat prospektifitas kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.	1. Analisis Shift and Share	1. Sektor perdagangan dan jasa termasuk ke dalam sektor unggul dan agak unggul diantara sektor lainnya. Asumsi tersebut berlaku untuk Kecamatan 201Gunung Toar sehingga

Penulis	Judul	Tujuan	Metode Pendekatan Studi	Hasil Studi
				usaha untuk mendorong dan mengembangkan sektor perdagangan dan jasa mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dengan menjadikan Kecamatan Gunung Toar, tepatnya di Desa Kampung Baru menjadi pusat perdagangan dan jasa.
			2. Analisis SAP ETOP	2. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa Kecamatan Gunung Toar berada pada posisi sebagai usaha ideal dan profil keunggulan strategis menguntungkan, maka diperoleh bahwa pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Gunung Toar merupakan suatu usaha yang prospektif.
Novia Ayu Ningsih (progamstudi perencanaan wilayah dan kota, UIR, Tugas akhir, 2018)	Strategi Pengembangan Kawasan Industri Tenayan.	Merumuskan strategi pengembangan Kawasan Industri Tenayan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi karakteristik serta potensi dan masalah dalam	1. Analisis Kebijakan dan Deskriptif Kualitatif	Telah terdapat sinkronisasi rencana pembangunan Kawasan Industri Tenayan dalam Kebijakan Keruangan dan Sektoral.

Penulis	Judul	Tujuan	Metode Pendekatan Studi	Hasil Studi
		pengembangan Kawasan Industri Tenayan.	<p data-bbox="1404 405 1646 1157"></p> <p data-bbox="1404 1157 1646 1340">2. Pendekatan evaluasi normatif</p>	<p data-bbox="1646 405 2011 1157">2. Progres pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Tenayan eksisting hingga tahun 2018 masih pada tahap persiapan berupa pembebasan lahan peruntukan KIT seluas 266 Ha, penyiapan dokumen AMDAL. UPL-UKL, <i>Masterplan</i>, jalan 70 menuju KIT, dan sedang dalam perumusan pengesahan Perda Pernyataan Modal Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap PT. SPP selaku pengelola dan pengembangan KIT yang ditunjuk oleh walikota Pekanbaru pada tahun 2017 lalu.</p> <p data-bbox="1646 1157 2011 1340">1. Terdapat kesesuaian ruang pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kota yang membahas mengenai</p>

Penulis	Judul	Tujuan	Metode Pendekatan Studi	Hasil Studi
				<p>arahan pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang terkait perencanaan pembangunan Kawasan Industri Tenayan</p> <p>2. Ketersediaan infrastruktur eksisting di dalam KIT pada tahun 2018 masih berupa jalan utama dengan ROW 70 menuju KIT, dan PLTU 2 x 110 MV.</p>
			3. Analisis SWOT	<p>Berdasarkan hasil analisis, adapun beberapa strategi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Penguatan dasar hukum dalam rencana pembangunan Kawasan Industri Tenayan diantaranya adalah percepatan pengesahan Perda</p>

Penulis	Judul	Tujuan	Metode Pendekatan Studi	Hasil Studi
				<p>terkait Penyertaan Modal dan Perda RTRW Kota Pekanbaru, pengendalian perizinan untuk mengarahkan industri eksisting yang polutif ke Kawasan Industri Tenayan, percepatan pembuatan Amdal-Lalin, dan <i>positioning</i> Kawasan Industri Tenayan sebagai kawasan industri yang berwawasan lingkungan.</p> <p>b. Dalam hal perizinan, strateginya adalah dengan percepatan pengesahan Perda Penyertaan Modal agar dapat dikeluarkan izin prinsip yang akan digunakan untuk syarat pengurusan izin yang lain,</p>

Penulis	Judul	Tujuan	Metode Pendekatan Studi	Hasil Studi
				yaitu izin lingkungan, izin lokasi, izin usaha kawasan industri dan hak guna bangunan.
Dharfrimadil Akhyar (program studi perencanaan wilayah dan kota, Tugas Akhir, 2015)	Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan Industri Pelintung di Pesisir Dumai.	Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengembangan lahan kawasan industry di Kelurahan Pelintung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis persepsi masyarakat</li> <li>2. Analisis Guna Lahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Kawasan Industri Pelintung (KIP) memberikan dampak yang positif terhadap Kelurahan Pelintung baik dari perkembangan dan kemajuan daerah sekitar, sosial ekonomi masyarakat, ketenagakerjaan dan penyediaan sarana dan prasarana.</li> <li>2. Faktor yang mendorong KIP untuk terus memperluas kepemilikan lahan antara lain: sarana prasarana, sumber daya manusai, lingkungan, ekspansi perusahaan, letak dan posisi yang strategis.</li> </ol>
Hillary Zodape, Prasad U Patil, Anil Ranver (Environmental science & technology, Department of technology	Sustainable Industrial Development	Untuk mengetahui <i>Green Industri</i> sebagai bentuk pembangunan industri berkelanjutan.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa kegunaan dari green industri untuk membantu negara berkembang dengan menekan pada aspek sosial</li> </ol>

Penulis	Judul	Tujuan	Metode Pendekatan Studi	Hasil Studi
Shivaji University, Kolhapur, India)				<p>dan lingkungan. Negara berkembang dengan kecemasan terhadap kekurangan sumber daya infrastruktur industri sebenarnya memiliki peluang untuk meningkatkan rasa kompetitif dengan mengaplikasikan sumberdaya secara efisien dan pelatihan, peningkatan pengetahuan tentang pengembangan green industri.</p>



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data, baik data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah yang kemudian menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atau data yang diinginkan. Metodologi penelitian merupakan elemen penting untuk menjaga reabilitas dan validitas hasil penelitian (Bungin,2011).

#### **3.1 Pendekatan Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis yang menekankan pada penilaian numerik atas fenomena yang dipelajari atau dengan kata lain menggunakan data-data tabulasi atau data angka. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus (Meleong, *dalam* Kuntjojo 2009).



## 3.2 Teknik Penelitian

### 3.2.1 Jenis Data

Data-data yang diperlukan dan dikaji dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.

1. Data Kuantitatif yaitu data berupa angka atau numerik yang bisa diolah dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana yang meliputi data PDRB wilayah acuan dan lokal tiap sektor.
2. Data Kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka tetapi berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian baik dalam bentuk uraian kalimat atau pun penjelasan yang meliputi gambaran umum wilayah penelitian, dan kondisi industri yang ada.

### 3.2.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil obsevasi lapangan (Sangadji, 2010). Peneliti turun langsung ke lapangan atau daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk seperti rekaman, hasil wawancara, kuesioner dan foto.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari surat kabar dan majalah maupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dapat berasal dari buku, literatur, atau bahan referensi lainnya. Dalam

penelitian ini, data diperoleh dari beberapa instansi seperti Dinas BAPPEDA Kota Pekanbaru, Badan Pusat Statistik, dan lain-lain.

### **3.3 Tahapan Penelitian**

#### **3.3.1 Tahap persiapan**

Persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum memulai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Tahap awal dalam memulai penelitian ini adalah dengan mencari literatur terkait dengan kajian prospektifitas dan pengembangan kawasan. Kemudian menyesuaikan dengan lokasi penelitian yang akan diambil mulai dari mengidentifikasi kondisi di lapangan, dan lain sebagainya.

2. Pengajuan Judul

Tahap selanjutnya yakni mengajukan judul penelitian kepada ketua program studi setelah melakukan dan mendapatkan bimbingan awal kepada dosen yang bersangkutan terkait dengan rumusan masalah, sasaran, hingga metode penelitian yang akan dilakukan.

3. Penyusunan Proposal

Tahap selanjutnya yakni penyusunan proposal yang terdiri dari tiga bab yakni bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, dan bab metode penelitian. Seluruh bab tersebut harus disusun secara matang melalui proses bimbingan dengan dosen pembimbing yang bersangkutan. Penyusunan proposal ini nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam seminar proposal.

### 3.3.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah melewati tahap persiapan dan menyelesaikan proposal penelitian, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian. Untuk mencapai hasil akhir penelitian, dibutuhkan data-data pendukung baik data sekunder dan primer yang didapatkan melalui kegiatan survey. Pelaksanaan survey lapangan untuk setiap jenis data yang dibutuhkan sangat bergantung pada kesiapan rencana survey. Jika program rencana survey telah tersusun, maka faktor yang diperlukan hanyalah penyediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu.

### 3.3.3 Tahap Kompilasi Data

Kompilasi data pada dasarnya adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan data untuk mendapatkan hasil akhir berupa data setengah jadi yang siap untuk diolah pada tahap analisis. Jadi disini sasaran dari kompilasi adalah usaha maksimal yang perlu dilakukan dalam usaha menjadikan data lapangan menjadi data siap untuk dianalisis. Mengingat data lapangan yang akan diolah masih berupa sekumpulan formulir kuesioner pengisian oleh responden atau berupa sekumpulan formulir isian hasil pengamatan lapangan, dimana data-data tersebut masih setengah jadi sedangkan yang ingin dihasilkan adalah berupa tabulasi, ataupun matriks siap analisis, maka akan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data *entry* dan *editing*
- b. Verifikasi data *entry*
- c. Pemeriksaan konsistensi data
- d. Koreksi data

### 3.4 Teknik Sampling

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability sampling dan Nonprobability sampling (Sugiyono,2011).

Menentukan sampel dalam suatu populasi memiliki aturan serta beberapa teknik tertentu dalam menentukannya. Pada dasarnya teknik sampling memiliki dua teknik yang dapat di gunakan untuk penarikan sampel, yaitu Probability sampling dan nonprobability sampling.

Sasaran dalam penelitian ini merupakan stakeholder – stakeholder yang terkait dengan sektor unggulan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya yaitu baik dari pihak pemerintah daerah maupun pihak swasta yang ikut mengelola sektor industri. Penentuan sampel dalam hal ini ialah *non-probability* sampling yaitu *purposif* sampling. *Purposif* sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. *Purposif* sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2011).

Pertimbangan dalam penentuan sampel dapat dilihat dari hubungan keterkaitan ataupun kepentingan sampel atau responden terhadap penelitian. Responden yang dipilih merupakan responden yang ahli di bidangnya. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu dapat di lihat di Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1**  
**Responden Penelitian**

<b>Instansi</b>	<b>Responden</b>	<b>Kompetensi</b>
Kantor Camat	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Camat Tenayan Raya</li> <li>– Sekretaris Camat Tenayan Raya</li> <li>– Kepala Bidang/Kepala Seksi</li> </ul>	Berkompeten karena merupakan regulator dalam menentukan kebijakan – kebijakan dalam lingkup wilayahnya.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kepala bidang Perencanaan</li> </ul>	Berkompeten dalam menyusun kebijakan terkait dengan strategi pengelolaan sektor potensial.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kepala Bidang Perindustrian</li> </ul>	Berkompeten karena merupakan dinas yang menyusun program dan kebijakan dibidang sektor – sektor potensial.
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tokoh masyarakat</li> </ul>	Berkompeten karena merupakan pelaku kegiatan dan penggerak kegiatan industri

*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

### **3.5 Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian yang dilakukan agar data yang diperoleh dapat lebih akurat dalam penggunaan data sebagai acuan penelitian. Setelah data primer dan sekunder diperoleh, maka data tersebut dianalisis sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun analisis yang digunakan dalam Kajian Pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Tenayan Raya adalah sebagai berikut:

#### **3.5.1 Analisis Prospek Pengembangan**

Prospek pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya cukup menjanjikan. Dengan posisi daerah yang terletak di kawasan industri, yang mana dapat memberikan andil besar untuk kawasan Kecamatan Tenayan Raya dan kawasan sekitarnya. Untuk mengetahui prospek pengembangannya secara detail dapat digunakan analisis SWOT (SAP dan ETOP).

Tahap paling awal dan mendasar dari studi ini adalah identifikasi dan analisis potensi, peluang, kendala serta hambatan/ ancaman dari kondisi umum wilayah studi. Pada tahap ini digunakan metode kualitatif sederhana SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Treatment*).

Untuk mengenali masalah dalam analisis ini digunakan tabel analisis yang mendeskripsikan masing-masing objek/ lokasi yang potensial, pendeskripsian masing- masing objek yang memuat pertimbangan kualitatif, dapat dilihat pada **Tabel 3.2** sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pertimbangan Kualitatif SWOT**

Faktor Eksternal	Faktor Internal	
	Strenght (S)	Weakness (W)
Opportunity (O)	SO	WO
Treatment (T)	ST	WT

*Sumber; Astuti, dkk, 2018*

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan analisis SWOT ini adalah sebagai berikut:

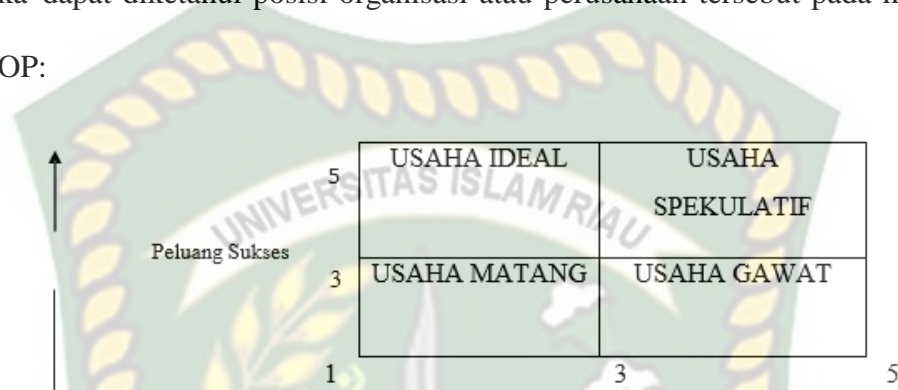
### 3.5.2 Analisis Variabel Eksternal (Matriks ETOP)

Melalui matrik ETOP dapat diketahui dimana posisi suatu usaha pengembangan, apakah pada usaha ideal, usaha dewasa, usaha spekulatif ataupun pada usaha yang gawat. Berikut ini adalah cara-cara penentuan matriks ETOP, yaitu:

1. Identifikasi elemen-elemen yang merupakan peluang dan ancaman
2. Pemberian bobot pada masing-masing elemen

3. Mengalikan bobot dengan nilai, untuk mendapatkan nilai tertimbang
4. Menjumlahkan nilai tertimbang dari elemen peluang

Setelah diketahui nilai tertimbang dari elemen peluang dan ancaman maka dapat diketahui posisi organisasi atau perusahaan tersebut pada matriks ETOP:



Sumber : Astuti, dkk, 2018

**Gambar 3.1**  
**Matriks ETOP**

### 3.5.3 Analisis Variabel Internal

Langkah-langkah analisis variabel internal dapat dilakukan dengan prosedur yang sama dengan penentuan matriks ETOP akan tetapi memakai elemen-elemen kekuatan dan kelemahan berdasarkan variabel internal maka dapat diketahui profil keunggulan strategis atau *Strategic Advantage Profile* (SAP). Untuk menentukan SAP, maka perlu diadakan klasifikasi variabel internal sebagai berikut:

- Penentuan skala

$$I = (\text{Skala maksimal-skala minimal})/\text{jumlah klasifikasi}$$

$$I = (5-1)/6 \quad I = 0.67$$

- Pengelompokan posisi persaingan, dapat dilihat pada **Tabel 3.3** berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Pengelompokan Posisi SAP**

Nilai	Posisi
1 - 1.66	Hindari (Avoid)
1.67 - 2.33	Lemah (Weak)
2.34 – 3	Dapat dipertahankan (Tenable)
3.01 – 3.67	Menguntungkan (Favourable)
3.68 – 4.34	Kuat/ Yakin (Strong)
4.35 – 5.01	Menonjol (Dominan)

Sumber : Astuti, dkk, 2018

### 3.5.4 Analisis Matriks SWOT

Analisis matriks SWOT merupakan analisis yang dipergunakan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa Kecamatan Tenayan Raya. Dalam analisis matriks SWOT ini digunakan variabel-variabel kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan/ ancaman.

Dari analisis tersebut dapat dibuat matriks SWOT sebagai berikut:



**Tabel 3.4**  
**Matriks SWOT**  
**(SAP)/ETOP**

<b>SAP/ ETOP</b>	<b>Ideal</b>	<b>Matang</b>	<b>Spekulasi</b>	<b>Gawat</b>
Hindari	P	P	P	P
Lemah	P	P	P	P
Dapat dipertahankan	P	P	P	U
Menguntungkan	P	P	U	U
Kuat/yakin	P	U	U	U
Menonjol	U	U	U	U

Sumber: Astuti, dkk, 2018

**Keterangan:**

P = *Prospektif*

U = *Unprospective*

**3.5.5 Analisa Sektor Ekonomi Basis**

Analisa ini digunakan untuk melihat daya dukung ekonomi wilayah Kota Pekanbaru dalam kaitannya dengan aliran pergerakan industri intra serta inter Kabupaten/Kota. Pada bagian ini terlebih dahulu akan dilakukan identifikasi sektor strategis yang diarahkan untuk mengetahui sektor-sektor yang memiliki keunggulan untuk dikembangkan di wilayah Kota Pekanbaru dilihat dari potensi, penciptaan pendapatan dan lapangan kerja, maupun interaksinya dengan sektor-sektor lain di dalam dan luar daerah sehingga dapat diketahui sektor yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di dalam wilayah Kota Pekanbaru sendiri dan berpotensi untuk bergerak ke luar wilayah.

Untuk mengetahui spesifikasi relatif sektor atau kegiatan ekonomi tertentu di suatu wilayah perencanaan, maka dapat digunakan *Metode Location Quatien (LQ)*. Variabel pengukuran yang digunakan disini untuk melihat sektor basis wilayah, dimana unuk melihat komoditas yang berpotensi mendukung pengembangan wilayah adalah variabel Produk Domestik regional Bruto (PDRB) wilayah perencanaan dan PDRB daerah acuan yang dalam hal ini adalah Propinsi Riau.

$$LQ : \frac{PDRB_{\text{sektorDaerahLokal}} / \sum PDRB_{\text{sektorDaerahLokal}}}{PDRB_{\text{sektorDaerahAcuan}} / \sum PDRB_{\text{sektorDaerahAcuan}}}$$

Sumber :Mutaali, 2015

Apabila LQ suatu sektor >1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis atau dapat ditafsirkan bahwa kegiatan sektor tersebut di daerah bersangkutan sangat dominan. Bahkan dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mempunyai potensi kuat untuk mengirim ke luar daerah (hasilnya).

Sedangkan bila LQ =1 dapat ditafsirkan bahwa kegiatan sektor tersebut cukup mantap di daerah yang bersangkutan, yang berarti tidak dominan dan tidak lemah kegiatannya (produk yang dihasilkan mencukupi untuk *supply* daerah itu sendiri). Dan bila nilai LQ <1, dapat ditafsirkan bahwa kegiatan sektor tersebut masih lemah, bukan merupakan sektor basis sehingga untuk lebih jelasnya bahwa daerah tersebut masih membutuhkan atau mendatangkan produk/sektor dari daerah lain.

### 3.5.6 Analisis *Shift and Share*

Metoda ini digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor unggul daerah dalam kaitannya dengan perekonomian acuan (wilayah acuan/wilayah yang lebih luas) dalam dua atau lebih titik waktu.

Analisis ini bertitik tolak pada asumsi pertumbuhan sektor daerah sama dengan pada tingkat wilayah acuan, membagi perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi daerah (lokasi) dalam tiga komponen:

1. Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPN), mengukur perubahan kinerja ekonomi pada perekonomian acuan. Hal ini diartikan bahwa daerah yang bersangkutan tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan secara umum.
2. Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP): mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Apabila komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan bernilai positif, berarti bahwa sektor tersebut berkembang dalam perekonomian acuan. Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya.
3. Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK): mengukur kinerja sektor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian acuan. Apabila komponen ini pada salah satu sektor positif, maka daya saing sektor lokal meningkat dibandingkan sektor yang sama pada ekonomi acuan dan apabila negatif terjadi sebaliknya.

Dengan demikian apabila perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi kota adalah PEK, maka pesamaannya dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PEK} = \text{KPN} + \text{KPP} + \text{KPK}$$

- Analisa KPN :  
KPN :  $[(Y^*/Y)-1]$
- Analisa KPP :  
KPP :  $[(Y'i/Yi) - (Y^*/Y)]$
- Analisa KPK:  
KPK :  $[(y'i/yi) - (Y'i/Yi)]$
- PN :  $\text{KPP} + \text{KPK}$

$Y^*$  = indikator ekonomi acuan akhir tahun kajian

$Y$  = indikator ekonomi acuan awal tahun kajian

$Yi'$  = indikator ekonomi acuan sektor i akhir tahun kajian

$Yi$  = indikator ekonomi acuan sektor i awal tahun kajian

$yi'$  = indikator ekonomi acuan (lokal) sektor i akhir tahun kajian

$yi$  = indikator ekonomi daerah (lokal) sektor i awal tahun kajian

Pergeseran Netto (PN) dihitung dengan rumus:  $\text{PN} = \text{KPP} + \text{KPK}$

Langkah-langkah dalam analisis ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Langkah 1 : Menghitung dan membandingkan pertumbuhan pendapatan di daerah dengan wilayah acuan

Langkah 2 : Menghitung perubahan pendapatan daerah setiap sektor, yaitu dengan memperkurangkan pendapatan pada akhir waktu kajian untuk masing-masing sektor dengan pendapatan pada awal tahun kajian.

Langkah 3 : Menghitung komponen masing-masing pertumbuhan sesuai rumus yang telah dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

- Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPN)
- Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP)
- Komponen Pertumbuhan Daya Saing (KPK)

Langkah 4 : Menafsirkan hasil perhitungan dengan menemukanli sektor-sektor KPP yang bertanda positif dan negatif.

Langkah 5 : Menemukanli sektor KPK yang bertanda positif dan negatif.

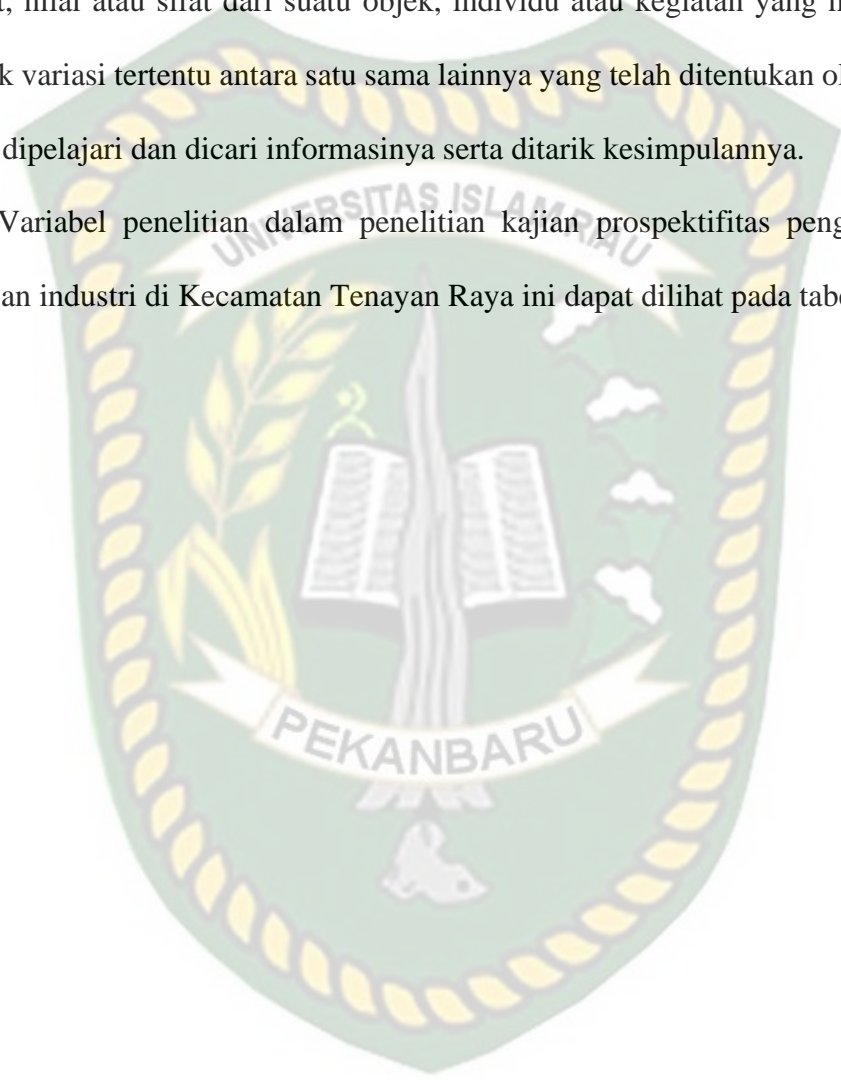
Langkah 6 : Menghitung pergeseran bersih (net shift) untuk menemukan sektor-Sektor maju dan kurang maju, yaitu dengan menjumlahkan komponen KPP dan KPK dari masing-masing sektor. Apabila hasil penjumlahan yang diperoleh untuk suatu sektor adalah positif maka sektor yang bersangkutan termasuk maju. Sebaliknya apabila negatif, maka sektor tersebut kurang maju.

Langkah 7 : Menemukanli sektor-sektor yang termasuk unggul, agak unggul, agak mundur dalam selang waktu kajian.

### 3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah apa saja yang menjadi objek dari suatu penelitian atau suatu yang diperhatikan (Arikunto,2006). Variabel penelitian merupakan suatu atribut, nilai atau sifat dari suatu objek, individu atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu sama lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya.

Variabel penelitian dalam penelitian kajian prospektifitas pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya ini dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.5**  
**Variabel Penelitian**

No	Tujuan Penelitian	Variabel Data	Indikator	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis Data	Output
1.	Mengidentifikasi apakah sektor industri merupakan sektor ekonomi basis di Kecamatan Tenayan Raya	– Pendapatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	– PDRB Provinsi Riau tahun 2018 – PDRB Kota Pekanbaru tahun 2018	Data Sekunder	– Pemerintah Kota Pekanbaru – BPS Provinsi Riau – BPS Kota Pekanbaru	– <i>Analisis Location Quatien (LQ)</i>	Teridentifikasinya sektor ekonomi basis Kota Pekanbaru sebagai acuan untuk Kecamatan Tenayan Raya.
2.	Menentukan sektor unggulan di Kecamatan Tenayan Raya.	– Pendapatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	– PDRB Provinsi Riau per sektor tahun 2018 – PDRB Provinsi Riau per sektor tahun 2015 – PDRB Kota Pekanbaru per sektor tahun 2018 – PDRB Kota Pekanbaru per sektor tahun 2015	Data Sekunder	– Pemerintah Kota Pekanbaru – BPS Provinsi Riau – BPS Kota Pekanbaru	– <i>Analisis Shift and Share</i>	Mengetahui sektor unggulan yang terdapat pada Kecamatan Tenayan Raya.

3.	Mengidentifikasi potensi dan permasalahan terkait sektor industri di Kecamatan Tenayan Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Potensi dan Permasalahan terkait sektor industri di Kecamatan Tenayan Raya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kekuatan</li> <li>– Kelemahan</li> <li>– Peluang</li> <li>– Ancaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Primer</li> <li>• Data Sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wawancara</li> <li>– Observasi Lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Analisis SWOT (SAP &amp; ETOP).</li> </ul>	Teridentifikasi potensi dan permasalahan terkait prospektifitas pengembangan sektor industri di Kecamatan Tenayan Raya.
4.	Teridentifikasi tingkat prospektifitas pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sektor basis di Kecamatan Tenayan Raya</li> <li>– Sektor unggulan di Kecamatan Tenayan Raya</li> <li>– Potensi dan permasalahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sektor basis</li> <li>– Sektor Unggulan</li> <li>– Potensi Permasalahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Primer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hasil Analisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Analisis deskriptif</li> </ul>	Teridentifikasi tingkat prospektifitas pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya.

Sumber: Hasil Analisis, 2020



### 3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kawasan Industri di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk waktu penelitian dilakukan selama bulan januari 2020 sampai dengan agustus 2020. Berikut tabel 3.6 Waktu Pelaksanaan Penelitian.

**Tabel 3.6**  
**Waktu Pelaksanaan Penelitian**

No	Uraian Pekerjaan	Bulan							
		2020							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Pengumpulan Data								
	Data Sekunder								
	Data Primer								
	Kuesioner								
4	Pengelolaan dan Analisis data								
5	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian								
6	Seminar Hasil								
7	Sidang Komprehensif								

Sumber: Hasil Analisis, 2020

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM WILAYAH

#### 4.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Kecamatan Tenayan Raya Merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru. Luas wilayah Kecamatan Tenayan Raya adalah 171,27 km<sup>2</sup>. Dengan batas-batas wilayah adalah:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Sungai Siak;
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar;
- Sebelah barat : berbatasan dengan Sungai Sail.

Wilayah Kecamatan Tenayan Raya secara administrasi pemerintahan terbagi atas 13 kelurahan, yang dibagi lagi menjadi 129 RW dan 462 RT. Wilayah kecamatan sejumlah 13 kelurahan tersebut merupakan penetapan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2017, setelah adanya pemekaran kelurahan di kota Pekanbaru. Kelurahan di Kecamatan Tenayan yang awalnya memiliki 4 kelurahan mengalami pemekaran menjadi 13 kelurahan. Catatan terakhir yang menunjukkan tentang pemekaran kelurahan baru tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Bambu Kuning;
2. Kelurahan Industri Tenayan;
3. Kelurahan Sialang Sakti;

4. Kelurahan Tuah Negeri;
5. Kelurahan Sialang Rampai;
6. Kelurahan Pebatuan;
7. Kelurahan Pematang Kapau
8. Kelurahan Mentangor;
9. Kelurahan Melebung.

#### 4.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Tenayan Raya tiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kecamatan Tenayan Raya tercatat sebanyak 141.584 jiwa dan pada tahun 2018 naik menjadi 167.929 jiwa. Untuk lebih jelasnya , jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Tenayan Raya dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel. 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya, 2014 - 2018.**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kulim	27.529	27.985	28.602	2.041	2.095
2	Tangerang Timur	30.401	31.017	31.734	20.038	20.565
3	Rejosari	36.811	37.564	38.084	22.553	23.159
4	Bencah Lesung	-	-	-	22.322	22.911
5	Sialang Rampai	-	-	-	4.772	4.894
6	Pebatuan	-	-	-	10.472	10.747

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
7	Mentangor	-	-	-	14.771	15.159
8	Pematang Kapau	-	-	-	15.417	15.824
9	Sialang Sakti	-	-	-	21.625	22.195
10	Tuah Negeri	-	-	-	6.340	6.507
11	Melebung	-	-	-	845	868
12	Industri Tenayan	-	-	-	2.553	2.620
13	Bambu Kuning	-	-	-	19.861	20.385
Jumlah Penduduk		141.584	145.302	146.571	163.610	167.929

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2019

Penduduk Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2018 sebesar 167.929 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 86.620 jiwa (51,30%) dan penduduk perempuan 81.309 jiwa (48,70%). Penduduk laki-laki di Kecamatan Tenayan Raya lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dengan seks rasio di Kecamatan Tenayan Raya sebesar 107 artinya terdapat 107 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin di Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

**Tabel. 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Tenayan Raya**  
**Tahun 2018**

NO	Kelurahan	Jenis Kelamin (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kulim	1.101	994	2.095	111
2	Tangkerang Timur	10.443	10.122	20.565	103
3	Rejosari	11.776	11.383	23.159	103
4	Bencah Lesung	11.779	11.132	22.911	106
5	Sialang Rampai	2.998	1.896	4.894	158
6	Pebatuan	5.528	5.219	10.747	106
7	Mentangor	7.768	7.391	15.159	105
8	Pematang Kapau	8.162	7.662	15.824	107
9	Sialang Sakti	11.487	10.708	22.195	107
10	Tuah Negeri	3.353	3.154	6.507	106
11	Melebung	492	376	868	131
12	Industri Tenayan	1.319	1.301	2.620	101
13	Bambu Kuning	10.414	9.971	20.385	104
Jumlah		86.620	81.309	167.929	107

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2019

Sedangkan jika di lihat dari jumlah rumah tangga, adapun jumlah rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya 38.884 rumah tangga pada tahun 2018 dengan

rata – rata keseluruhan per rumah tangga yaitu 4 jiwa per rumah tangga. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.3 berikut.

**Tabel. 4.3**  
**Jumlah Penduduk dan Rumah tangga Menurut kelurahan di**  
**Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2018.**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Penduduk Per Rumah Tangga
1	Kulim	2.095	871	2
2	Tangkerang Timur	20.565	4.707	4
3	Rejosari	23.159	5.567	4
4	Bencah Lesung	22.911	5.032	4
5	Sialang Rampai	4.894	1.729	2
6	Pebatuan	10.747	2.623	4
7	Mentangor	15.159	4.501	3
8	Pematang Kapau	15.824	4.272	4
9	Sialang Sakti	22.195	3.056	7
10	Tuah Negeri	6.507	1.040	6
11	Melebung	868	142	6
12	Industri Tenayan	2.620	421	6
13	Bambu Kuning	20.385	4.923	4
Total		167.929	38.884	4

Sember: BPS Kota Pekanbaru 2019

Adapun kepadatan penduduk Kecamatan Tenayan Raya dari Tahun 2014 – 2018 terus meningkat dan sampai pada tahun 2018 penduduk Kecamatan Tenayan

Raya terdapat 980 orang/km<sup>2</sup>, untuk data kepadatan penduduk dapat di lihat pada tabel 4.4 berikut.

**Tabel. 4.4**  
**Kepadatan Penduduk Kecamatan Tenayan Raya Tahun**  
**2014 –2018**

No	Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )
1.	2014	827
2.	2015	843
3.	2016	856
4.	2017	955
5.	2018	980

Sember: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru

#### 4.2 Perekonomian

Kecamatan Tenayan Raya adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki kondisi perekonomian yang hampir sama dengan setiap kondisi perekonomian kecamatan lain yang ada di Kota Pekanbaru yang mayoritas penduduknya masih bermata pencaharian melalui sektor pertanian, perkebunan dan sektor perdagangan dan jasa. Akan tetapi ada pula yang bermata pencaharian diluar sektor tersebut yakni pada sektor industri.

Kota Pekanbaru memiliki 3 sektor yang di jadikan sektor unggulan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, sektor kontruksi dan sektor industri.

Salah satu sektor unggulan tersebut berada di Kecamatan Tenayan Raya. Kecamatan Tenayan Raya memiliki jumlah industri terbesar dari semua kecamatan

lainnya yang ada di Kota Pekanbaru, yakni dengan jumlah 865 industri yang terdiri atas industri mikro atau kecil, industri sedang, dan industri besar yang menjadi penyumbang besar bagi pekeconomian masyarakat dan daerah.

### 4.3 Tenaga Kerja

Menurut Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969 menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja adalah peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan.

Untuk data tenaga kerja yang bekerja di sektor industri yang ada di Kecamatan Tenayan Raya dari tahun 2014 – 2018 dapat di lihat pada tabel 4.5 berikut.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Tenaga Kerja Sektor industri di Kecamatan Tenayan Raya tahun 2014 – 2018.**

No.	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja
1.	2014	5.159
2.	2015	5.260
3.	2016	2.004
4.	2017	2.195
5.	2018	2.322

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2019.



#### **4.4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru**

Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah barang dan jasa yang di hasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian pada suatu daerah dalam tahun tertentu. PDRB Kota Pekanbaru atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha atau sektor. Pemecahan menjadi subsektor ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan pada tabel 4.6 berikut ini beserta PDRB Provinsi Riau sebagai acuan.



Tabel 4.6

## PDRB Kota Pekanbaru Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016 – 2019 (Dalam milyar Rupiah)

Kategori	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	935,61	974,14	1015,19	1070,25
B	Pertambangan dan Penggalian	10,53	10,78	10,74	10,63
C	Industri Pengolahan	16449,06	17579,17	18924,58	19920,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	131,30	131,68	133,50	169,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,60	11,73	11,74	12,03
F	Konstruksi	16968,65	18226,66	19398,47	20736,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17061,11	18157,41	19431,65	20835,47
H	Transportasi dan Pergudangan	1529,90	1608,77	1657,78	1602,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1047,02	1084,73	1136,70	1154,60
J	Informasi dan Komunikasi	1790,10	1895,37	2024,76	2211,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2354,01	2298,52	2419,50	2421,80
L	Real Estate	1744,09	1784,84	1846,06	1951,44

Kategori	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
MN	Jasa Perusahaan	11,51	12,51	13,78	14,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2269,22	2281,13	2298,76	2361,74
P	Jasa Pendidikan	612,29	617,70	645,65	687,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	287,01	308,72	332,92	366,56
RSTU	Jasa Lainnya	678,07	735,37	806,97	873,46
	Jumlah	60891,07	64619,26	68108,76	72200,41

Sumber: PDRB Kota Pekanbaru berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha, 2020

**Tabel 4.7**  
**PDRB Provinsi Riau Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016 – 2019 (Dalam Milyar Rupiah)**

Kategori	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2016	2017	2018 <sup>x</sup>	2019 <sup>xx</sup>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	113287,59	119281,64	124599,68	129732,37
B	Pertambangan dan Penggalian	103958,45	97348,95	92012,61	85633,73
C	Industri Pengolahan	112525,10	115717,11	118761,10	120005,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	272,25	275,07	284,54	324,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	62,40	65,36	65,21	66,48
F	Konstruksi	36137,43	38275,86	40367,57	42898,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	40709,27	43302,34	46090,20	48453,84
H	Transportasi dan Pergudangan	3889,19	4070,19	4200,34	4241,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2087,36	2179,20	2280,96	2338,96
J	Informasi dan Komunikasi	3883,71	4094,53	4323,76	4725,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4481,27	4381,00	4584,21	4592,22
L	Real Estate	4087,73	4223,51	4376,73	4610,55

Kategori	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2016	2017	2018 <sup>x</sup>	2019 <sup>xx</sup>
MN	Jasa Perusahaan	24,11	26,02	28,15	29,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8203,39	8282,84	8364,07	8597,34
P	Jasa Pendidikan	2184,91	2266,74	2376,27	2533,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	824,91	872,90	921,48	1020,00
RSTU	Jasa Lainnya	2150,28	2320,26	2521,48	2742,12
	Jumlah	458769,34	470983,51	482158,38	495845,91

Sumber : PDRB Provinsi Riau berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha, 2020

Catatan : <sup>x</sup> Angka Sementara

<sup>xx</sup>Angka Sangat Sementara

**Tabel 4.8**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016 – 2019**

Kategori	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2016	2017	2018 <sup>x</sup>	2019 <sup>xx</sup>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.94	4.12	4.21	5.42
B	Pertambangan dan Penggalian	2.43	2.46	-0.39	-1.00
C	Industri Pengolahan	6.87	7.66	3.08	5.33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.87	0.29	1.38	27.14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1.45	1.13	0.08	2.41
F	Konstruksi	6.20	7.41	6.43	6.90
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.87	6.43	7.02	7.22
H	Transportasi dan Pergudangan	3.24	5.16	3.05	-3.36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.18	3.60	4.79	1.57
J	Informasi dan Komunikasi	5.66	5.88	6.83	9.25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.61	-2.36	5.26	0.09
L	Real Estat	1.87	2.34	3.43	5.71

Kategori	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2016	2017	2018 <sup>x</sup>	2019 <sup>xx</sup>
MN	Jasa Perusahaan	3.41	8.73	10.11	6.45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1.40	0.52	0.77	2.74
P	Jasa Pendidikan	0.45	0.88	4.52	6.46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.97	7.56	7.84	10.10
RSTU	Jasa Lainnya	9.14	8.45	9.74	8.24
PDRB		5.68	6.12	5.40	6.01

Sumber: PDRB Kota Pekanbaru atas harga konstan menurut lapangan usaha, 2020

Catatan : <sup>x</sup> Angka Sementara

<sup>xx</sup>Angka Sangat Sementara

Kecamatan Tenayan Raya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki luas wilayah terbesar dari kecamatan lainnya di Kota Pekanbaru yakni 171,27 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Tenayan Raya masih belum berkembang dan tumbuh secara optimal dan memiliki potensi yang besar untuk berkembang pada sektor industri yang mana sektor tersebut tidak lepas dari salah satu sektor unggulan penyusun penyusun PDRB Kota Pekanbaru.



Sumber : Hasil Survei, 2020

**Gambar 4.1**  
**Industri Kecil/Mikro**





Sumber : Hasil Survei, 2020

**Gambar 4.2**  
**Industri Batubata**



Sumber : Hasil Survei, 2020

**Gambar 4.3**  
**Industri sedang dan besar**

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Sektor Unggulan di Kecamatan Tenayan Raya

##### 5.1.1. Analisis Sektor *Location Quotient* (LQ)

Perekonomian suatu kota akan meningkat apabila kota tersebut dapat menangkap peluang-peluang yang ada di sekitarnya dan juga memanfaatkan potensi-potensi yang ada di kota itu sendiri. Adapun peluang besar yang prospektif adalah potensi banyaknya jumlah industri di Kecamatan Tenayan Raya dan masih luasnya Kawasan Kecamatan Tenayan Raya.

Analisis LQ ini digunakan untuk melihat sektor-sektor di Kota Pekanbaru yang menjadi acuan oleh wilayah Kecamatan Tenayan Raya untuk berperan kepada wilayah yang besar serta prospektif untuk dikembangkan. Analisis ini juga akan memperlihatkan sektor mana saja yang termasuk kedalam sektor basis dan non basis yang ada di Kota Pekanbaru. Penghitungan LQ ini menggunakan data PDRB yang terdiri dari sembilan sektor atau lapangan usaha berdasarkan harga konstan yang dibandingkan dengan data PDRB Provinsi Riau pada tahun 2016-2019.

Berikut perhitungan salah satu sektor analisis LQ:

Analisa LQ (*Location Quotient*) untuk sektor pertanian, peternakan, kehutanan tahun 2016:

$$LQ = \frac{\text{PDRB sektor Daerah Lokal} / \text{total PDRB sektor Daerah Lokal}}$$

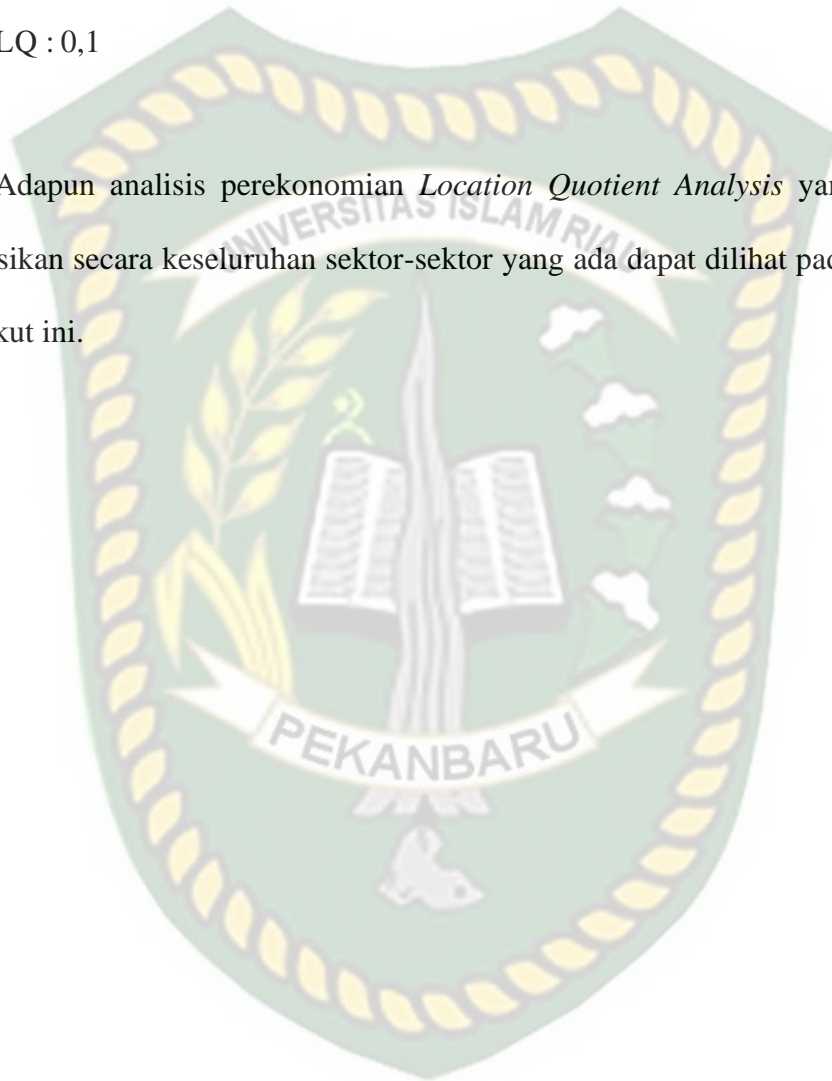
$$\frac{\text{PDRB sektor Daerah Acuan} / \text{total PDRB sektor Daerah Acuan}}$$

LQ : Rp. 935,61/ Rp. 63,891,070,00

Rp. 113,287,59/ Rp. 438,769,340,00

LQ : 0,1

Adapun analisis perekonomian *Location Quotient Analysis* yang telah di tabulasikan secara keseluruhan sektor-sektor yang ada dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.



**Tabel 5.1**  
**Hasil Analisis LQ Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Tahun 2016 dengan 2019**

No	Sektor/Lapangan Usaha	PDRB Kota Pekanbaru (Milyar Rupiah)		PDRB Provinsi Riau (Milyar Rupiah)		Nilai LQ		Keterangan	
		2016	2019	2016	2019	2016	2019		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	935,61	1070,25	113287,59	129732,37	0,1	0,1	turun	Sektor non basis
2	Pertambangan dan Penggalian	10,53	10,63	103958,45	85633,73	0	0	naik	Sektor non basis
3	Industri Pengolahan	16449,06	19920,17	112525,1	120005,45	1	1	tetap	Sektor basis
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	142,9	181,76	334,65	390,91	3,2	3,2	turun	Sektor basis
5	Konstruksi	16968,65	20736,42	36137,43	42898,59	3,5	3,3	turun	Sektor basis
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18108,13	21990,07	42796,63	50792,8	3,2	3	turun	Sektor basis
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3320	3814,1	7772,9	8966,67	3,2	2,9	turun	Sektor basis
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa	4109,61	4387,9	8593,1	9232,78	3,6	3,3	turun	Sektor basis
9	Jasa-jasa	3846,58	4289,11	13363,49	14892,61	2,2	2,1	turun	Sektor basis
	Jumlah	63891,07	76400,41	438769,34	462545,91				

Sumber : hasil analisis, 2020

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dilihat bahwa sektor di Kota Pekanbaru yang menjadi acuan untuk Kecamatan Tenayan Raya, yang merupakan sektor basis adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, real estat dan jasa, dan sektor jasa jasa lainnya. Pada tabel 5.1 dapat dilihat bahwa sektor industri adalah sektor basis yang artinya sektor industri telah memenuhi kebutuhan dalam maupun luar wilayah Kota Pekanbaru. Sektor industri ini sendiri memiliki nilai  $LQ = 1$ , yang dapat diartikan bahwa kegiatan sektor industri tersebut merupakan sektor basis yang memiliki potensi untuk dikembangkan di daerah Kota Pekanbaru, khususnya Kecamatan Tenayan Raya, yang berarti tidak dominan dan tidak lemah pula kegiatannya (produk yang dihasilkan mencukupi untuk *supply* daerah Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Tenayan Raya khususnya). Dengan demikian berdasarkan analisis ini dapat dikatakan bahwa sektor industri memiliki prospektifitas untuk lebih dikembangkan di Kecamatan Tenayan Raya.

#### **5.1.2. Analisis *Shift and Share***

Untuk analisis *shift and share*, menggunakan data PDRB Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2016 dan 2019 dan PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2016 dan 2019. Analisis ini nantinya akan menunjukkan nilai keunggulan kompetitif dan komparatif masing-masing sektor yang siap untuk bersaing dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.

Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini.

**Tabel 5.2**  
**Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau**  
**Tahun 2016 dengan 2019**

No	Sektor/Lapangan Usaha	PDRB Kota Pekanbaru (Milyar Rupiah)		PDRB Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	
		2016	2019	2016	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	935,61	1070,25	113287,59	129732,37
2	Pertambangan dan Penggalian	10,53	10,63	103958,45	85633,73
3	Industri Pengolahan	16449,06	19920,17	112525,1	120005,45
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	142,9	181,76	334,65	390,91
5	Konstruksi	16968,65	20736,42	36137,43	42898,59
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18108,13	21990,07	42796,63	50792,8
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3320	3814,1	7772,9	8966,67
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa	4109,61	4387,9	8593,1	9232,78
9	Jasa-jasa	3846,58	4289,11	13363,49	14892,61
Jumlah		63891,07	76400,41	438769,34	462545,91
Pertumbuhan PDRB/PDB		18,57%		8,08%	

Sumber: PDRB Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru Tahun 2016-2019

Berdasarkan tabel diatas pendapatan di Kota Pekanbaru mengalami perubahan sebesar 18,57% sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Sedangkan untuk Provinsi Riau juga mengalami pertumbuhan yakni sebesar 8,08% sejak tahun 2016 hingga tahun 2019.

Perhitungan :

a. Analisa nilai KPN :

$$\begin{aligned} \text{KPN} & : [(Y^*/Y)-1] \\ & : [(495845,91 / 458769,34) - 1] \\ & : 0.081 \end{aligned}$$

b. Analisa nilai KPP :

$$\begin{aligned} \text{KPP} & : [(Y'i/Yi) - (Y^*/Y)] \\ & : [(129732,37 / 113287,59) - (495845,91 / 458769,34)] \\ & : 0.064 \end{aligned}$$

c. Analisa nilai KPK :

$$\begin{aligned} \text{KPK} & : [(y'i/yi) - (Y'i/Yi)] \\ & : [(1070,25 / 935,61) - (129732,37 / 113287,59)] \\ & : -0.0013 \end{aligned}$$

d. Analisa nilai PN :

$$\begin{aligned} \text{PN} & : \text{KPP} + \text{KPK} \\ & : (0.064) + (-0.0013) \\ & : 0.0631 \end{aligned}$$

Sedangkan perubahan pendapatan daerah setiap sektor dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini.



**Tabel 5.3**  
**Perubahan Pendapatan Daerah Tiap Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2016**  
**dengan 2019**

No	Sektor/Lapangan Usaha	PDRB Kota Pekanbaru (Milyar Rupiah)		Perubahan Pendapatan
		2016	2019	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	935,61	1070,25	134,64
2	Pertambangan dan Penggalian	10,53	10,63	0,1
3	Industri Pengolahan	16449,06	19920,17	3471,11
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	142,9	181,76	38,86
5	Konstruksi	16968,65	20736,42	3767,77
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18108,13	21990,07	3881,94
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3320	3814,1	494,1
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa	4109,61	4387,9	278,29
9	Jasa-jasa	3846,58	4289,11	442,53
	Jumlah	63891,07	76400,41	11309,34

Sumber: PDRB Kota Pekanbaru tahun 2016-2019

**Tabel 5.4**  
**Komponen KPN, KPP, KPK, dan PN**

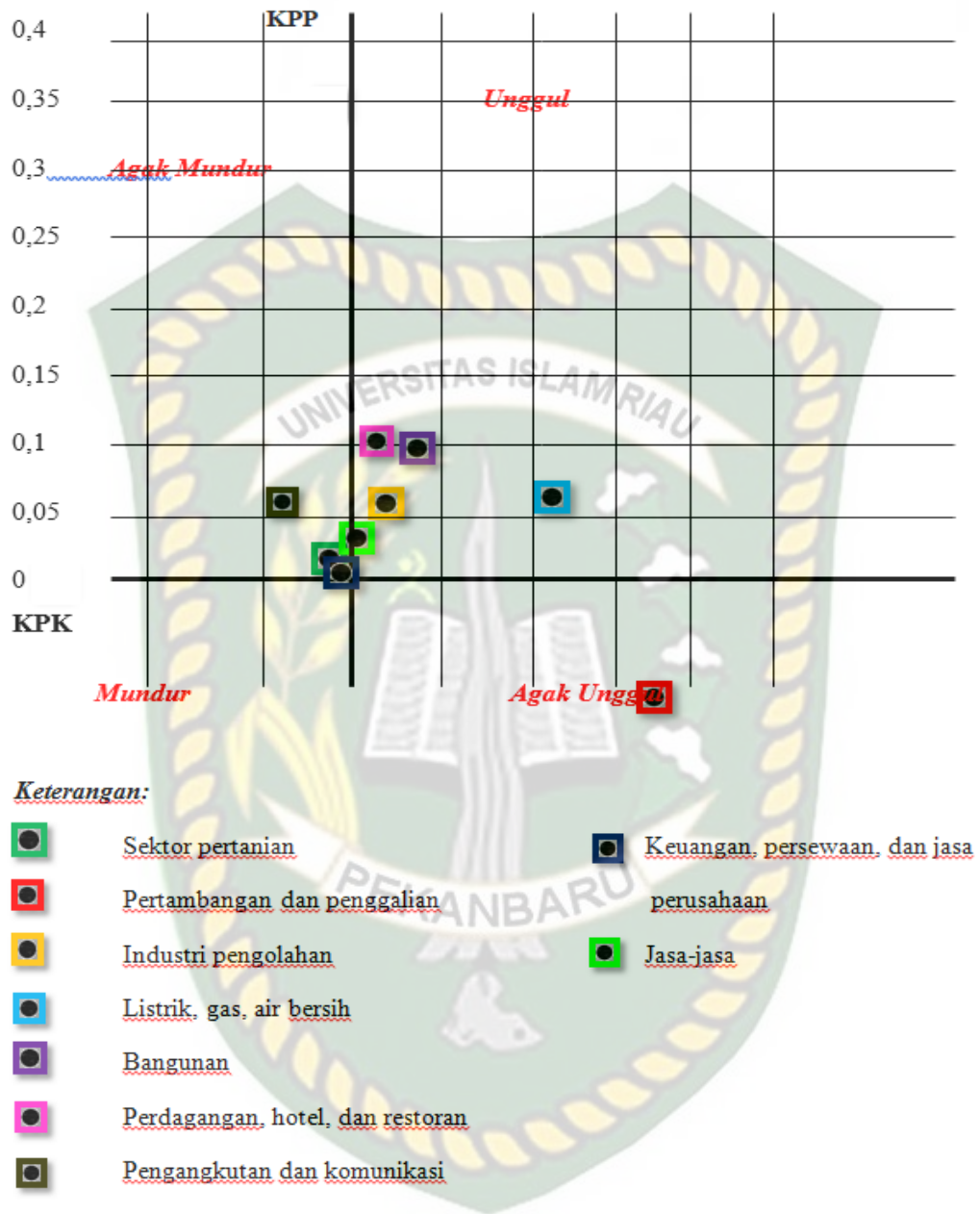
No	Sektor/Lapangan Usaha	KPN	KPP	KPK	PN
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	<b>0,081</b>	<b>0,064</b>	-0,0013	<b>0,0631</b>
2	Pertambangan dan Penggalian	<b>0,081</b>	-0,257	<b>0,1858</b>	-0,0713
3	Industri Pengolahan	<b>0,081</b>	<b>0,012</b>	<b>0,1445</b>	<b>0,1568</b>
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	<b>0,081</b>	<b>0,087</b>	<b>0,1038</b>	<b>0,1911</b>
5	Konstruksi	<b>0,081</b>	<b>0,106</b>	<b>0,0349</b>	<b>0,1412</b>
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	<b>0,081</b>	<b>0,106</b>	<b>0,0275</b>	<b>0,1336</b>
7	Pengangkutan dan Komunikasi	<b>0,081</b>	<b>0,073</b>	-0,0048	<b>0,0680</b>
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa	<b>0,081</b>	-0,006	-0,0067	-0,0131
9	Jasa-jasa	<b>0,081</b>	<b>0,034</b>	<b>0,0006</b>	<b>0,0342</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan KPP yang ditabulasikan diketahui bahwa tujuh sektor adalah bertanda positif. Hal ini memiliki arti bahwa ketujuh sektor tersebut merupakan sektor yang pesat pertumbuhannya dan pengaruhnya pada pendapatan daerah juga positif. Sedangkan pada pertambangan dan penggalian, serta keuangan, real estat, dan jasa memiliki pertumbuhan yang tidak terlalu pesat walaupun ada yang berada di sektor basis. Dominasi sektor yang bertanda positif dari hasil perhitungan ini, menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan berasal dari sektor yang pesat pertumbuhannya, maka porsinya akan meningkat dalam perekonomian wilayah acuan.

- b. Berdasarkan tabel tersebut tentang KPK dijelaskan bahwa dari 9 sektor yang dianalisis terdapat 6 sektor yang bernilai positif yaitu : 1) pertambangan dan penggalan, 2) industri pengolahan, 3) listrik, gas, dan air bersih, 4) konstruksi, 5) perdagangan, hotel, dan restoran, 6) jasa-jasa. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang mengalami peningkatan daya saing atau keunggulan komparatif daerah dalam kaitannya dengan daerah lain.
- c. Berdasarkan tabel tersebut nilai PN terdapat 7 sektor yang memiliki nilai positif. Sektor yang memiliki nilai positif ini menunjukkan bahwa sektor tersebut adalah sektor yang maju.
- d. Menemukanali sektor-sektor yang termasuk unggul, agak unggul, agak mundur, dan mundur.



Gambar 5.1

Kecendrungan sektor di Kota Pekanbaru acuan Kecamatan Tenayan Raya

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

Berdasarkan gambar 5.1 menjelaskan 6 sektor termasuk kedalam sektor dan agak unggul dari 9 sektor yang telah dianalisis, yaitu: a) Industri pengolahan; b)

listrik, gas, dan air bersih; c) pertambangan dan penggalan; d) konstruksi; e) perdagangan, hotel, dan restoran; dan f) jasa-jasa.

Sektor industri pengolahan termasuk kedalam sektor unggul yang berada dibawah sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor konstruksi. Asumsi tersebut juga berlaku untuk Kecamatan Tenayan Raya sehingga usaha untuk mendorong dan mengembangkan sektor industri pengolahann mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dengan menjadikan Kecamatan Tenayan Raya menjadi pusat industri di Kota Pekanbaru.

## 5.2 Analisis SWOT (*SAP & ETOP*)

Teknik analisis ini digunakan untuk melihat prospek dan pengembangan. Teknik ini telah digunakan pada penelitian yang terkait sebelumnya yaitu Maisaroh Lismaya (2013) dan proyek kerja lainnya di antaranya untuk mengetahui prioritas pengembangan wilayah, potensi wilayah, optimalisasi sarana dan prasarana disuatu wilayah, dan lain-lain. Adapun kelebihan yang dimiliki analisis ini adalah dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan dan hasilnya lebih terukur dibandingkan dengan analisis SWOT biasanya. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis variable kondisi internal *Strategic Advantage Profile* (SAP) serta kondisi eksternal *Environmental Threats Oppurtunity Profile* (ETOP) untuk mengetahui prospektifitas pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya.

### 5.2.1 Strategic Advantage Profile (SAP)

Analisis ini menggunakan perhitungan berdasarkan hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan yang dipercaya mengetahui kondisi internal wilayah dan industri yang ada di Kecamatan Tenayan Raya. Adapun kondisi internal yang dimaksud adalah kekuatan dan kelemahan wilayah Kecamatan Tenayan Raya terkait dengan bidang industri.

Adapun cara perhitungan untuk bobot dan nilai kekuatan adalah sebagai berikut:

C = Jumlah bobot elemen kekuatan

E = Tingkat error

$$C = B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6$$

$$E = 0,5$$

$$C = 46 + 44 + 40 + 44 + 47 + 47$$

$$C = 268$$

BE1 = Bobot Elemen Kekuatan point 1

NE1 = Nilai elemen kekuatan  
point 1

$$BE1 = \frac{B1}{C} \times E$$

NE1 = Jumlah nilai elemen  
jumlah responden

$$BE1 = \frac{46}{268} \times 0,5$$

$$NE1 = 46 / 10$$

$$BE1 = 0,09$$

$$NE1 = 4,6$$

Berikut ini adalah rekapitulasi perhitungan analisis SAP untuk mendapatkan nilai tertimbang dari elemen kekuatan dan kelemahan:

**Tabel 5.5**  
**Rekapitulasi Perhitungan Elemen Kekuatan**

No	Elemen Kekuatan	BOBOT (B)	NILAI (N)	SKOR (B X N)
1	Kecamatan Tenayan Raya memiliki luas wilayah terbesar di Kota Pekanbaru dapat dikembangkan menjadi Kawasan industri	0,09	4,1	0,35
2	Potensi Sektor industri yang berada pada posisi ketiga dalam menyumbang pendapatan Kota Pekanbaru dan menjadi Kawasan pusat kegiatan industri	0,08	3,8	0,31
3	Dengan jumlah industri terbesar dari keseluruhan kecamatan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru yang dapat meningkatkan PDRB	0,07	3,7	0,28
4	Kecamatan Tenayan Raya yang termasuk kedalam Wilayah Pengembangan (WP)-IV, yaitu sebagai Kawasan permukiman, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan perdagangan, Kawasan perkantoran pemerintahan kota, Kawasan pariwisata dan Kawasan pertanian	0,08	3,8	0,31
5	Letak dan posisi Kecamatan Tenayan Raya yang diapit oleh 3 kabupaten di sekitar Kota Pekanbaru	0,09	4,1	0,36
6	Kecamatan Tenayan Raya yang termasuk kedalam jalur jaringan jalan lintas timur Sumatra	0,09	3,9	0,34
Jumlah				1,95

Sumber: Hasil Analisis, 2020





**Tabel 5.6**  
**Rekapitulasi Perhitungan Elemen Kelemahan**

No	Elemen Kelemahan	BOBOT (B)	NILAI (N)	SKOR (B X N)
1	Belum optimalnya pengembangan industri di Kecamatan Tenayan Raya sebagai penyumbang pendapatan Kota Pekanbaru	0,12	3,3	0,40
2	Masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Tenayan Raya belum merasakan perubahan ekonomi dan pendapatan secara signifikan seperti lapangan pekerjaan dan lain-lainnya	0,12	3,5	0,43
3	Terhambatnya realisasi rencana pembangunan Kawasan Industri Tenayan (KIT)	0,13	3,3	0,42
4	Belum optimalnya bantuan pemerintah kota dalam memfasilitasi dan meningkatkan kinerja dan produktivitas industri yang di kelola masyarakat	0,13	3,6	0,46
Jumlah				1,71

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil pembobotan serta penilaian yang dilakukan oleh informan, maka elemen kelemahan dengan skor tertinggi adalah belum optimalnya bantuan pemerintah kota dalam memfasilitasi dan meningkatkan kinerja dan produktivitas industri yang dikelola masyarakat. Sedangkan skor terendah adalah belum optimalnya pengembangan industri di Kecamatan Tenayan Raya sebagai penyumbang pendapatan Kota Pekanbaru. Hal ini akan berdampak tentunya bagi pengembangan kawasan.

Hasil analisis dari elemen kekuatan dan elemen kelemahan diperoleh nilai tertimbang (skor) yakni elemen kekuatan adalah 1,95, sedangkan elemen kelemahan adalah 1,71. Sehingga total nilai tertimbang (skor) dari analisis kedua elemen tersebut adalah 3,66 Berdasarkan hasil skor tersebut, maka posisi pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya berada pada interval 3,01 – 3,67, yang berarti pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya memiliki posisi yang “Menguntungkan” (*Favourable*) memiliki arti bahwa pengembangan berada pada suatu kondisi yang sangat baik dengan keunggulan dan prospek yang besar. Selain itu dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, pengembangan akan memperoleh keuntungan yang besar jika diiringi oleh manajemen yang baik. Pengembangan tersebut akan meningkatkan investasi dan memiliki kesempatan untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan dan menarik bagi masyarakat Kecamatan Tenayan Raya.

### **5.2.2 Environmental Threats Opportunity Profile (ETOP)**

Analisis ini menggunakan perhitungan berdasarkan hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan yang dipercaya mengetahui kondisi eksternal wilayah dan industri yang ada di Kecamatan Tenayan Raya. Adapun kondisi eksternal yang dimaksud adalah peluang dan ancaman wilayah Kecamatan Tenayan Raya terkait dengan bidang industri.

Adapun untuk cara perhitungan untuk bobot dan nilai peluang adalah sebagai berikut:

C = Jumlah bobot elemen peluang

E = Tingkat error

$$C = B1 + B2 + B3 + B4$$

$$E = 0,5$$

$$C = 44 + 44 + 46 + 44$$

$$C = 178$$

BE1 = Bobot Elemen Peluang point 1

NE1 = Nilai elemen Peluang  
point 1

$$BE1 = \frac{B1}{C} \times E$$

NE1 = Jumlah nilai elemen  
jumlah responden

$$BE1 = \frac{44}{178} \times 0,5$$

$$NE1 = 45 / 10$$

$$BE1 = 0,12$$

$$NE1 = 4,5$$

Berikut ini adalah rekapitulasi perhitungan analisis ETOP untuk mendapatkan nilai tertimbang dari elemen Peluang dan Ancaman:

**Tabel 5.7**  
**Rekapitulasi Perhitungan Elemen Peluang**

No	Elemen Peluang	BOBOT (B)	NILAI (N)	SKOR (B X N)
1	Pengembangan Kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya dapat menumbuhkan pusat pertumbuhan baru	0,12	4,2	0,50
2	Kawasan Industri Tenayan ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Kota Pekanbaru dalam Draft RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2013-2033	0,12	4,5	0,54
3	Membuka peluang untuk berinvestasi bagi para investor	0,14	4,5	0,59
4	Terciptanya berbagai jenis usaha yang mampu menyerap sejumlah tenaga kerja	0,12	4,4	0,53
Jumlah				2,16

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil pembobotan serta penilaian yang dilakukan oleh para informan, maka elemen peluang yang memiliki skor tertinggi adalah membuka peluang berinvestasi bagi para investor. Sedangkan skor terendah adalah pengembangan Kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya dapat menumbuhkan pusat pertumbuhan baru.

Adapun untuk cara perhitungan untuk bobot dan nilai ancaman adalah sebagai berikut:

C = Jumlah bobot elemen ancaman

E = Tingkat error

$$C = B1 + B2 + B3 + B4$$

$$E = 0,5$$

$$C = 43 + 43 + 46 + 44$$

$$C = 176$$

BE1 = Bobot Elemen Ancaman point 1

NE1 = Nilai elemen Ancaman  
point 1

$$BE1 = \frac{B1}{C} \times E$$

NE1 = Jumlah nilai elemen  
jumlah responden

$$BE1 = \frac{43}{176} \times 0,5$$

$$NE1 = 39 / 10$$

$$BE1 = 0,12$$

$$NE1 = 3,9$$

**Tabel 5.8**  
**Rekapitulasi Perhitungan Elemen Ancaman**

No	Elemen Ancaman	BOBOT (B)	NILAI (N)	SKOR (B X N)
1	Limbah dari kegiatan industri yang dapat merusak lingkungan	0,12	3,9	0,47
2	Perkembangan teknologi yang cepat menuntut perubahan pada teknolog industri.	0,12	3,6	0,43
3	Adanya keterbatasan keterampilan SDM lokal dan daerah, sehingga penyerapan tenaga dari luar daerah lebih diutamakan	0,13	3,5	0,46
4	Dibutuhkan dana yang sangat besar untuk pengembangan Industri Tenayan	0,13	4,4	0,57
Jumlah				1,93

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil pembobotan serta penilaian yang dilakukan oleh para informan, maka elemen ancaman yang memiliki skor tertinggi adalah dibutuhkan dana yang sangat besar untuk pengembangan industri Tenayan. Sedangkan skor terendah adalah perkembangan teknologi yang cepat menuntut perubahan pada teknologi industri yang digunakan.

Dari hasil analisis kedua elemen tersebut, maka diperoleh nilai tertimbang (skor) dari elemen peluang adalah 2,16, sedangkan nilai tertimbang (skor) untuk elemen ancaman adalah 1,93. Kemudian hasil nilai tertimbang dari kedua elemen tersebut dimasukkan kedalam matriks ETOP. Sehingga diperoleh bahwa posisi pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Tenayan Raya sebagai “Usaha

Matang”. Posisi usaha matang ini diartikan bahwa pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Tenayan Raya cukup cocok untuk dikembangkan. Akan tetapi perlu mengatasi permasalahan yang ada guna mendorong pengembangan kearah yang lebih maksimal karena memiliki potensi yang besar dimasa yang akan datang, harus disertai implementasi dan manajemen yang baik.

### 5.2.3 Analisis SWOT (SAP & ETOP)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Tenayan Raya berada pada posisi sebagai profil strategis menguntungkan dan sebagai usaha matang, maka diperoleh bahwa Pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Tenayan Raya merupakan suatu usaha yang “Prospektif”. Hal ini didapatkan berdasarkan hasil analisis sebelumnya yang kemudian di masukkan kedalam matriks SWOT (SAP & ETOP). Untuk lebih jelas dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 5.9**  
**Matriks SWOT**  
**(SAP)/ETOP**

SAP/ ETOP	Ideal	Matang	Spekulasi	Gawat
Hindari	P	P	P	P
Lemah	P	P	P	P
Dapat dipertahankan	P	P	P	U
Menguntungkan	P	P	U	U
Kuat/yakin	P	U	U	U
Menonjol	U	U	U	U

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Keterangan : P = Prospektif

U = Unprospektif

### 5.3 Analisis Tingkat Prospektifitas

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh bahwa Kecamatan Tenayan Raya memiliki tingkat prospektifitas yang cukup baik untuk dikembangkan menjadi Kawasan industri. Hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ untuk sektor industri pada Kota Pekanbaru memiliki nilai 1, yang mana sektor ini termasuk juga kedalam sektor basis yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kota Pekanbaru dan khususnya di Kecamatan Tenayan Raya. Berdasarkan analisis ini, sektor ini memiliki nilai tetap dari tahun 2016-2019 sebagai penyumbang PDRB Kota Pekanbaru, dan bisa lebih dikembangkan lagi untuk kedepannya secara optimal.

Kemudian berdasarkan hasil analisis *Shift and Share*, sektor industri berada pada quadran “Unggul” pada diagram analisis *Shift and Share*. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri memiliki keunggulan yang sangat berpotensi untuk lebih dikembangkan guna lebih meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya.

Berdasarkan analisis terakhir yang digunakan, yakni analisis SWOT (SAP & ETOP), diperoleh hasil bahwa sektor industri merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan lebih jauh lagi di Kecamatan Tenayan Raya. Dari tahapan SAP diperoleh bahwa sektor industri di Kecamatan Tenayan Raya mendapat nilai skor 3,66, yang kemudian dimasukkan kedalam matriks SAP dan tergolong kedalam “Menguntungkan” (*Favourable*). Kemudian pada tahapan ETOP diperoleh bahwa sektor industri di Kecamatan Tenayan Raya mendapatkan nilai 2,16 dan 1,93. Yang kemudian kedua nilai tersebut diposisikan kedalam matriks



ETOP dan berada pada posisi “Usaha Matang”. Setelah tahapan tersebut, kemudian hasil tahapan diposisikan ke dalam matriks SWOT (SAP & ETOP) yang memperoleh hasil bahwa Pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Tenayan Raya berada pada posisi yang “Prospektif” untuk dikembang lebih lanjut.

Dengan letak dan posisi Kecamatan Tenayan Raya yang berada di tengah dari kabupaten tetangga dari Kota Pekanbaru, yakni Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan juga Kabupaten Kampar akan menjadi faktor penting dalam penyebaran hasil produksi industri yang ada di Kecamatan Tenayan Raya. Faktor lainnya yang mendukung hal ini adalah Kecamatan Tenayan Raya yang juga berada pada jalur jaringan jalan lintas timur Sumatra yang selalu ramai di lintasi oleh berbagai jenis orang yang memungkinkan untuk menambah peminat dari hasil produksi industri yang dihasilkan oleh Kecamatan Tenayan Raya.

Dengan kondisi yang demikian memungkinkan untuk meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi pada berbagai kegiatan industri yang di produksi di Kecamatan Tenayan Raya.

Kemudian hasil produksi dari berbagai kegiatan industri yang ada di Kecamatan Tenayan Raya ini tentunya akan meningkatkan tingkatan taraf ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan juga akan meningkatkan pendapatan untuk daerah Kecamatan Tenayan Raya, maupun Kota Pekanbaru. Dengan berkembangnya Kecamatan Tenayan Raya menjadi Kawasan Industri tentunya juga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Tenayan Raya. Kegiatan-kegiatan industri yang dilakukan dapat menyerap tenaga

kerja dalam jumlah yang besar. Dengan demikian akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk pemerintah Kota Pekanbaru.

Akan tetapi perlunya juga peningkatan sarana prasarana guna menekan seminimal mungkin ancaman dan dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan industri yang dilakukan. Seperti pengelolaan limbah hasil kegiatan-kegiatan industri yang ramah lingkungan dan tidak merusak bagi semua pihak, baik lingkungan, serta kehidupan masyarakat yang ada di sekitaran lokasi industri dan yang bertempat tinggal di Kecamatan Tenayan Raya.

Selain dari pengelolaan limbah, prasarana jaringan jalan rasanya perlu untuk ditingkatkan juga. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan mobilitas kegiatan-kegiatan industri, baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam hal memasukkan bahan baku guna untuk diproses menjadi barang dengan nilai jual yang lebih tinggi.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Setelah penelitian ini dilaksanakan serta berdasarkan pada analisis *Location Quotient* (LQ), analisis *Shift and Share*, dan analisis SWOT ETOP, maka diperoleh kesimpulan:

1. Untuk sektor unggulan, berdasarkan *Location Quotient Analysis*, bahwa sektor industri berada pada posisi yang cukup mantap di Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Tenayan Raya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $LQ = 1$ . Pada tahun 2016 sampai dengan 2019 nilai ini tetap berada pada nilai 1. Dengan ini dapat dikatakan bahwa sektor industri masih dapat dikembangkan menjadi lebih optimal untuk masa yang akan datang.
2. Berdasarkan analisis *Shift and Share* diperoleh Sektor industri pengolahan termasuk kedalam sektor unggul yang berada dibawah sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor konstruksi. Asumsi tersebut juga berlaku untuk Kecamatan Tenayan Raya sehingga usaha untuk mendorong dan mengembangkan sektor industri pengolahann mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dengan menjadikan Kecamatan Tenayan Raya menjadi pusat industri di Kota Pekanbaru.
3. Kecamatan Tenayan Raya sangat prospektif terhadap sektor industri yang sangat potensial untuk dikembangkan berdasarkan nilai tertimbang pada bobot elemen dan nilai elemen peluang dan ancaman yang diperoleh adalah

2,16 dan 1,93, hasil tersebut disesuaikan posisinya kedalam matriks ETOP. Hasilnya adalah Kecamatan Tenayan Raya berada pada posisi usaha matang/ prospektif untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Berdasarkan nilai tertimbang yang telah didapat pada bobot elemen dan nilai elemen kekuatan dan kelemahan, maka diperoleh 1,95 dan 1,71. Hasil tersebut kemudian disesuaikan posisinya kedalam matriks klasifikasi SAP, sehingga memperoleh hasil yakni prospektifitas pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tenayan Raya pada posisi yang menguntungkan (*favourable*).

4. Berdasarkan analisis- analisis yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa Kecamatan Tenayan Raya memiliki potensi dan prospektifitas yang sangat baik untuk dikembangkan untuk masa yang akan datang di bidang industri.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dan analisis yang didapat, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya pemeliharaan dan peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan, pelayanan dan pemeliharaan, pengembangan Kecamatan Tenayan Raya sebagai kawasan industri agar dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya secara signifikan baik dalam bentuk peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat Kecamatan Tenayan Raya serta terhadap PDRB Kota Pekanbaru.

2. Diperlukannya peningkatan kerja sama antara pihak pemerintah, dan investor dengan pelaku industri guna meningkatkan produktivitas hasil industri dan mengembangkannya kearah yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Qur'an Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Daru Sunnah.
- Alwi, Et.Al. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Adisasmita, R. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad, Lincolin. 2015. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Dirdjojuwono, Roestanto W. 2004. *Kawasan Industri Indonesia*. Bogor: Pustaka Wirausaha.
- Djojodipuro, Marsudi. 1994. *Pengantar Ekonomi Untuk Perencanaan*. Jakarta: UI-Press.
- Kuntjojo. 2009. *Metode Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Rachbini, Didik J. 2001. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sangadji, Eta Mamang. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offsite.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2000. *Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Prima Mitra Media.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Zakasyi. 2013. *Entrepreneur Radikal*. Jakarta: Renebook.

## **B. Tugas Akhir**

- Akhyar, Dharfrimadil. 2015. *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan Industri Pelindung di Pesisir Dumai*. Tugas Akhir. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
- Arifandi, Djayanegara. 2013. *Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Industri Besar Di Kota Semarang*. Tugas Akhir. Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Dianiffa, H. A. 2015. *Strategi Pengembangan Industri Mocaf di Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Maisaroh, Lismaya. 2013. *Prospektifitas Pelabuhan Penyeberangan Ro-ro Dumai Terhadap Sektor Fisik dan Ekonomi Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat*. Tugas Akhir. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
- Ningsih, Novia Ayu. 2018. *Strategi Pengembangan Kawasan Industri Tenayan Kota Pekanbaru*. Tugas Akhir. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik. Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
- Setyawati, E.A. 2002. *Pengaruh Kegiatan Operasi Kawasan Industri terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan*. Skripsi. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian. Bogor. IPB.
- Suweca, Agus Maryasa. 2010. *Penerapan Manajemen Laba pada Waktu sebelum Krisis Global dan saat Krisis Global*. Minor Thesis. Malang. Universitas Brawijaya.

## **C. Jurnal dan Prosiding**

- Abdurachmat, dan Maryani. 1997. *Geografi Ekonomi*. Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS. Bandung. IKIP Bandung.
- Astuti, Puji dkk. 2018. *Prospektifitas Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau*. Jurnal Seminar Nasional BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Semarang: Bappeda Jawa Tengah.
- Kwanda, T. 2000. *Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia*. Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 28, No. 1, Juli 2000. Surabaya: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Kristen Petra

Soedarso, Budiono. 2001. *Pengembangan Promosi dan Investasi Kawasan (Teritorial Marketing) sebagai Wujud Pemanfaatan Ruang Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah*. Jurnal Pengembangan Wilayah dan Kota. Vol 3 Nomor 1 Hal 10-11. Jurusan Planologi Fakultas Teknik, Untar, Jakarta.

Zodape, Hillary dkk. *Sustainable Industrial Development*. Environmental science & technology, Department of technology Shivaji University, Kolhapur, India)

#### **D. Kebijakan Pemerintah**

Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja

Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional.

Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang kawasan industri.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya,

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 39 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri

#### **E. Dokumen Lainnya**

Badan Pusat Statistik. 2019. *Kota Pekanbaru dalam Angka 2019*. Pekanbaru.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Pekanbaru.